



# SISTEM INFORMASI DESA

Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa

Rangoaini Jahja  
Haryana  
Dina Mariana  
Meldi Rendra



**combine**  
RESOURCE INSTITUTION

**TIFA**  
KAMPUS

**Sistem Informasi Desa**  
**Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa**

**Penyusun:**

Ranggoaini Jahja  
Haryana  
Dina Mariana  
Meldi Rendra

**Tata letak sampul dan isi buku :**

Kadek Primayudi

**Penerbit:**

COMBINE Resource Institution (CRI)  
Jl. KH Ali Maksum RT 06 No 183 Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon  
Bantul, Yogyakarta, Indonesia. 55188  
Telp/Fax: 0274 - 411123 Website – <http://combine.or.id>

Cetakan pertama, Februari 2012

xiv + 92 hlm; 13 x 20 cm  
ISBN: 978-979-97983-9-8



*Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan mencantumkan jenis lisensi yang sama pada karya publikasi, kecuali untuk kepentingan komersial*

# UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini dapat disusun atas dukungan TIFA Foundation, yang membiayai penelitian hingga proses penggandaan.

Hasil penelitian yang digunakan oleh buku ini dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Strategis COMBINE Resource Institution.

Materi buku disusun bersama oleh:

Rangoaini Jahja

Haryana

Dina Mariana

Meldi Rendra

Penasehat: R. Yando Zakaria

Sepanjang riset hingga penyusunan buku ini tim juga menerima bantuan dan dukungan yang amat besar dari pengelola program Lumbung Komunitas CRI, Bambang Heri Purwanto selaku Program Manajer IDEA (Institute for Development and Economic Analysis ) Yogyakarta, Bapak Sudirman Alfian, Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Bapak Aripin selaku Kepala Desa Nglegi Kecamatan Patuk Gunung Kidul, Yogyakarta, atas kontribusi makalah, laporan dan intervensi eskensif dengan murah hati, sehingga semakin memperkaya buku ini. Juga saran dan masukan dari akademisi seperti Yanuar Nugroho (Pengajar di University of Machester, UK).



PENGANTAR

# EMANSIPASI LOKAL MEMBANGUN SISTEM INFORMASI DESA

*Sutoro Eko<sup>1</sup>*

Selama beberapa tahun terakhir saya menyaksikan hingar-bingar kehadiran profil desa (PD) dan sistem informasi desa (SID). PD merupakan evolusi dari monografi desa (yang sering saya jumpai ditulis secara permanen pada sebuah papan di kantor desa). Pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri, memberi amanat kepada desa untuk menyusun PD sebagai basis untuk penyusunan perencanaan desa dan pelayanan administratif kepada warga desa. Di balik instrumen ini, para pejabat Ditjen PMD Kemendagri selalu mengajarkan kepada kepala desa agar menguasai betul data yang akurat tentang wilayah, aset desa dan penduduk desa. Data diharapkan menjadi pijakan penting bagi kepala desa untuk mengambil keputusan secara tepat dalam pembangunan desa.

Teman saya di STPMD “APMD”, Hastowiyono, belakangan secara tekun mempelajari instrumen dan *software* PD, seraya mengajarkannya kepada desa. Dia menunjukkan daftar angket dan *software* PD itu kepada saya, dan secara spontan saya berseloroh: “Rumit amat sih”. Saya mengaku tidak sanggup memahami teknis

---

<sup>1</sup>Pembelajar desa, dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dan peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE).

instrumen dan *software* PD itu, tetapi saya berupaya memahami makna di balik PD. Dalam hal perencanaan misalnya, PD -- yang jika mengalami pemutakhiran (*update*) -- merupakan sentuhan teknokratis yang mampu melengkapi sentuhan partisipasi. Dengan kalimat lain, PD menjadi instrumen bagi *evidence based planning* yang memberi makna *voice based planning* melalui partisipasi warga.

Saya, Hastowiyono dan teman-teman lain di STPMD "APMD" mempunyai pengalaman bereksperimen menerapkan instrumen dan *software* PD di Desa Rantau Makmur, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kami bersama unsur-unsur perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan belajar bersama, menyiapkan tim, dan mengumpulkan data dari rumah ke rumah. Hastowiyono secara telaten dan sabar mengajari dan mendampingi tim PD. Mereka bekerja keras mengumpulkan data, melakukan *entry data*, tetapi ternyata Rantau Makmur kalang-kabut dalam membangun PD itu.

Kalau PD datang dari Kemendagri, Sistem Informasi Desa (selanjutnya disebut SID) merupakan inisiatif COMBINE Resource Institution, sebuah organisasi masyarakat sipil yang sangat tekun dan dedikatif dalam mengembangkan informasi dan komunikasi alternatif berbasis masyarakat. Institusi tempat saya bernaung, *Institute for Research and Empowerment* (IRE) dan COMBINE sama-sama mempunyai perhatian pada isu demokrasi dan desa. Tetapi ada perbedaan yang saling melengkapi di antara IRE dan COMBINE. IRE menaruh perhatian pada institusi aktor, dan tatakelola demokrasi, COMBINE menaruh perhatian pada ruang dan media bagi demokrasi. Dalam pandangan saya, COMBINE mempunyai keyakinan bahwa media merupakan pilar keempat dalam demokrasi, informasi merupakan darah bagi demokrasi, dan demokrasi yang membutuhkan komunikasi yang membebaskan. Kekinian ini merupakan inti ajaran Habermas tentang demokrasi. Dilandasi keyakinan itu, selama hampir sepuluh tahun, COMBINE tampil sebagai salah satu promotor gerakan Forum Warga, sebuah institusi untuk menyemai demokrasi deliberatif. Di ranah desa, COMBINE juga telah mempromosikan radio komunitas sebagai wahana partisipasi warga dan demokrasi deliberatif itu.

COMBINE terus melakukan inovasi dalam berkarya. Jika tahun-tahun lalu COMBINE mempromosikan demokrasi berbasis suara (*voice*) melalui radio komunitas dan forum warga, rupanya tiga tahun terakhir COMBINE mempromosikan informasi sebagai darah bagi demokrasi, melalui SID. COMBINE bersikap “emoh” pada PD dan meyakini SID sebagai alternatif atas PD. Tetapi sikap “emoh” ini bukan asal bunyi. COMBINE melakukan penelitian di Desa Nglegi dan Desa Terong sebelum membangun SID di dua desa itu.

Menurut catatan saya, penelitian CRI itu menyampaikan dua temuan kritis. *Pertama*, dari sisi *governance*, PD tidak cukup memadai sebagai instrumen dan ruang akuntabilitas publik yang menjadi modal bagi demokrasi pemerintahan desa dan bagi komunitas desa untuk membangun kapasitas *self-governing*.

*Kedua*, dari sisi teknis, PD kurang memadai dan bahkan kurang relevan. Struktur modulnya yang terkunci hanya memungkinkan perangkat desa untuk menginput data yang diminta, tanpa peluang untuk menambah atau mengolah lebih lanjut. Profil Desa merupakan desain data yang bersifat umum yang harus dikumpulkan pada sebuah desa. Data yang diwadahi oleh Profil Desa ini juga tidak cukup elaboratif untuk menampung keunikan yang dimiliki dari data sebuah desa. Ditinjau sistem pemutakhirannya, Profil Desa bersifat statik. Data diperbarui dalam selang minimal setahun sekali sehingga tidak mampu menjawab perkembangan dinamik masalah-masalah aktual desa. Keterbatasan pada sistem data di atas, kian diperparah dengan kenyataan bahwa sistem basis data Profil Desa masih digunakan untuk melayani pemerintah yang lebih tinggi. Ini menjadi bagian yang juga dikeluhkan oleh para perangkat pemerintah desa. Mereka beranggapan Profil Desa tidak mendukung kerja sehari-hari mereka, karena fitur-fitur yang tersedia lebih banyak ditujukan untuk melayani pelaporan satu arah ke pemerintahan di atas desa.

COMBINE menunjukkan (jika tidak bisa dibalang klaim) bahwa SID jauh lebih cerdas dan inovatif ketimbang PD. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan berbagai data milik desa

guna memudahkan proses pencarian. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya komunitas.

Berbeda dengan *delivery* PD yang hadir bersamaan dengan paket regulasi yang datang dari atas, COMBINE menyemai dan membangun SID dengan pendekatan pemberdayaan secara partisipatoris dari bawah, yakni melalui kemitraan, pembelajaran dan kerja bareng dengan pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat. Melalui cara itu, setidaknya ada dua hal penting yang menjadi basis relevansi kehadiran SID. *Pertama*, keinginan untuk mewujudkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Ini artinya SID sebagai perangkat informasi juga menjadi perangkat demokrasi. *Kedua*, banyaknya data desa yang berserakan dan tidak terkumpul secara rapi di arsip pemerintahan desa. Ini artinya SID merupakan perangkat teknokratis yang membuat penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih efisien dan efektif.

Tetapi SID tampaknya belum familiar bagi pemerintah, meskipun dalam RUU Desa versi pemerintah saat ini, ada kehendak pemerintah untuk membangun SID. Pemerintah daerah, karena patuh pada regulasi, selalu memegang teguh dan menjalankan PD. Bahkan ada pejabat daerah yang mengatakan bahwa SID itu “subversif”, sebab tidak ada payung hukum yang mengamankan desa untuk membuat SID, dan sebaliknya regulasi menghendaki desa menyiapkan PD. Tentu argumen “subversif” saat ini tidak terlalu serius jika dibandingkan dengan stigma “subversif” di masa lalu. Tetapi jika argumen subversif itu direproduksi di era sekarang bisa kontraproduktif dengan semangat kebangkitan otonomi desa, atau bisa membunuh prakarsa dan kreativitas desa. Karena itu saya memberikan respons cepat pada pejabat itu dan saya juga lakukan siaran tentang makna SID itu di berbagai tempat. Saya katakan bahwa kita harus memahami betul hakekat otonomi desa. Otonomi desa bukanlah otonomi pemberian dari pemerintah tetapi otonomi yang tumbuh berkembang “dari dalam” dan “dari bawah” atau yang sering saya sebut sebagai

emansipasi lokal. Meskipun SID belum mempunyai payung hukum, tetapi desa mempunyai otonomi dalam membangun dan menjalankan SID. SID adalah salah satu bentuk emansipasi lokal yang tidak hanya bermanfaat bagi desa tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi negara. Negara (pemerintah pusat, kementerian, parlemen, BPS, kejaksaan, pengadilan, tentara, polisi, perbankan, pemerintah daerah, dan sebagainya) tidak boleh melarang atau menyebut "subversif" terhadap karya-karya desa, termasuk SID, melainkan harus memberikan rekognisi (pengakuan dan penghormatan). SID sebagai karya desa itu sebaiknya dikodifikasi menjadi salah satu kewenangan lokal desa.

Praya, 16 Februari 2012

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	iii	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	x	
DAFTAR TABEL	xii	
DAFTAR BAGAN	xii	
DAFTAR SINGKATAN	xiii	
<b>BAB I</b>	PENDAHULUAN ; DATA DESA YANG BELUM MEMBANTU DESA	1
1.1	Problema dalam Perencanaan Pembangunan Pedesaan	1
1.2	Proses Menjadi Buku	8
1.3	Ringkasan Buku	11
<b>BAB II</b>	MENGELOLA DAN MEMBERDAYAKAN SISTEM INFORMASI DESA	13
2.1	Siklus Perencanaan Pembangunan	13
2.2	Sistem Informasi Desa sebagai Tanggapan atas Kebutuhan	19
2.3	SID untuk Merevitalisasi Profil Desa	26
2.3.1	Konsep dan Konten Profil Desa	27
2.3.2	Problematika Kebijakan tentang Profil Desa	30
<b>BAB III</b>	MENINGKATKAN MANFAAT DATA; PENGALAMAN DARI TERONG DAN NGLEGI	42
3.1	SID di Desa Terong	42
3.1.1.	Gambaran Umum	42
3.1.2.	Membangun Mimpi	44
3.1.3.	Tahapan	46
3.2.	SID Di Desa Nglegi	51
3.2.1.	Gambaran Umum	51
3.2.2.	Inisiasi dan Tahapan Program SID	52
3.2.3.	Tantangan SID	56
3.3	Memaknai SID sebagai jawaban atas persoalan	57
<b>BAB IV</b>	MEMANTAPKAN SID, PERLUASAN PENGARUH DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN	63
4.1.	Aspek yang Berperan dalam Alih Teknologi	64

4.2.	Rencana Advokasi untuk Perluasan ( <i>Scalling Up</i> )	71
4.2.1.	Aspek Pelembagaan di Tingkat Desa	73
4.2.2.	Aspek Pelembagaan di Tingkat Kabupaten	76
4.2.3.	Tantangan dari Pemkab Bantul dan Peluang dari Pemkab Gunung Kidul	77
4.2.4.	Peraturan Daerah sebagai Jawaban	79
<b>BAB V</b>	<b>CATATAN PENEKASAN</b>	<b>86</b>

DAFTAR PUSTAKA  
TENTANG PENULIS

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Komposisi data dasar Profil Desa
- Tabel 2 : Metode Pengumpulan Data
- Tabel 3 : Latar belakang lahirnya SID
- Tabel 4 : Perbandingan Desain Profil Desa dan SID
- Tabel 5 : Manfaat SID Berdasarkan Fungsi
- Tabel 6 : Manfaat SID Berdasarkan Aktor
- Tabel 7 : Data Pedukuhan dan Jumlah RT Desa Terong
- Tabel 8 : Peluang keberhasilan alih teknologi

## DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 : Alur sejarah pengembangan SID
- Bagan 2 : Alur Pelaksanaan Program SID oleh CRI
- Bagan 3 : Tahapan Pembangunan Sistem
- Bagan 4 : Pemanfaatan SID
- Bagan 5 : Pelaksanaan Program SID oleh IDEA
- Bagan 6 : Piramida Aspek Penyerapan Teknologi (*technology receptivity*)

## DAFTAR SINGKATAN

ADD	Alokasi Dana Desa
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	Badan Perwakilan Desa
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
CD	Casset Disk
CRI	COMBINE Resource Institution
DDK	Data Dasar Keluarga
FGD	Focus Group Discussion
FH	Fakultas Hukum
FIB	Fakultas Ilmu Budaya
FISIPOL	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IDEA	Institute for Development and Economic Analysis
IRE	Institute for Research and Empowerment
IT	Informasi dan Teknologi
Jamkesos	Jaminan Kesejahteraan dan Sosial
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
KK	Kepala Keluarga
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NIK	Nomer Induk Kependudukan
PADes	Pendapatan Asli Desa
Perdes	Peraturan Desa
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPATD	Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAM	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SID	Sistem Informasi Desa
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SOP	Standard Operasional Prosedur
STPMD "APMD"	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat desa "APMD"
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UGM	Universitas Gadjah Mada
UU	Undang Undang
Yandu	Pelayanan Terpadu



# DATA DESA YANG BELUM MEMBANTU DESA

## **1.1 Problema dalam Perencanaan Pembangunan Pedesaan**

Menggambarkan situasi pembangunan desa di hari ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks pengalaman di masa pemerintahan Orde Baru yang pernah berkuasa selama tiga dekade. Desa, kala itu seringkali diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pada level terbawah, dimana sistem sentralistik lah yang diberlakukan sehingga membatasi banyak hak-hak desa. Hal tersebut terbukti dengan substansi UU No. 5 Tahun 1979 yang menempatkan desa dalam pengertian administratif yang juga telah melakukan perubahan-perubahan struktur desa yaitu :

1. Penyeragaman struktur pemerintahan desa. Ini merupakan strategi dari Orde Baru untuk memberikan legitimasi dalam hal kontrol negara terhadap desa.
2. Pengintegrasian struktur pemerintah desa pada pemerintah nasional. Menempatkan pemerintah desa sebagai rantai akhir dan terbawah dari sistem birokrasi pemerintah yang sentralistik. Ini menjadikan desa hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.
3. Penghapusan lembaga perwakilan desa dan sentralisasi kekuasaan desa pada kepala desa.

Orde Baru dengan instrumen pendanaan legendarisnya yang

bersifat *top down* dikenal dengan Inpres bantuan desa, mengumbar segudang cerita sukses pembangunan desa. Hingga hari ini, sebagian orang masih berromantisme terhadap era itu sebagai puncak kejayaan yang tidak pernah dihasilkan oleh pemerintahan sesudah Orde Baru. Sederet cerita sukses pembangunan pedesaan di masa Orde Baru tidak dapat menutupi kenyataan bahwa pencapaian yang ada tidak terjadi secara merata<sup>1</sup>. Keberhasilan program ketahanan pangan yang diluncurkan selama periode 1970-1995, di satu sisi mengakibatkan struktur perekonomian desa yang sebelumnya berjalan dengan moda-produksi tradisional berubah menjadi moda produksi bergantung modal yang bermuara pada ketidakmerataan tingkat kesejahteraan<sup>2</sup>. Pada kerangka pembangunan ekonomi yang demikian, kemerosotan terjadi pada dimensi pembangunan di tingkat nasional. Tergambarkan pada pranata sosial dengan ciri gotong royong yang sebelumnya menyokong sendi kehidupan, berubah secara perlahan menjadi relasi yang bersandarkan pada transaksi komersial dan menghilangkan rasa saling percaya yang telah diwariskan masyarakat desa dari generasi ke generasi di masa lampau. Dalam perangkap ketergantungan serta eksploitasi sumber daya, terutama di sektor pangan dan pertanian, kita menemukan desa hingga di hari ini.

Kegagalan pembangunan pedesaan di masa lampau dapat diidentifikasi sebagai sejumlah poin krusial tentang masalah yang perlu diatasi hingga hari ini. RPJMN 2004-2009 misalnya, mengidentifikasi sejumlah masalah krusial tersebut: terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas; lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial; timbulnya hambatan (*barrier*) distribusi dan perdagangan antar daerah; tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan; rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan;

---

<sup>1</sup>Lihat "*Review Pembangunan Pedesaan*", Tim IRE Yogyakarta, terdiri dari: AAGN Ari Dwipayana (Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM), Andi Sandi (Hukum Tata Negara, FH UGM), Arie Sujito (Sosiologi Fisipol UGM), Bambang Hidayana (Antropologi FIB UGM), Krisdyatmiko (Sosiologi Fisipol UGM) dan Sutoro Eko (Ilmu Pemerintahan, STPMD "APMD" Yogyakarta).

<sup>2</sup>Arsyad, Lincolin, dkk "*Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*", cetakan 1, April 2011, Penerbit: STIM YKPN Yogyakarta.

rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan; rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berkecakupan rendah (*low skilled*); meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain; meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat; lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan<sup>3</sup>. Bila merunut kepada regulasi yang digunakan di masa itu, maka kita akan mengingat Permendagri No 9/1982 tentang Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D) yang menjadi sandaran hukum dari pembangunan model pembangunan *top-down*. Permendagri yang merupakan terjemahan dari perintah UU No. 5/1974 tentang Pemerintah Daerah, Keppres dan Kepmendagri tentang pembentukan Bappeda ini terus diadopsi hingga pemerintahan Abdurrahman Wahid<sup>4</sup>. Sempat mengalami kevakuman dan masa distorsi, perubahan gagasan untuk mengoreksi model pembangunan tersebut mulai dengan dikeluarkannya SE Bersama oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No. 1354/M.PPN/03/2004, 050/744/SJ perihal Pedoman Pelaksanaan Forum Musrembang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Menurut Sutoro Eko (2006), meski teks normatif dokumen hukum dan sistem perencanaan yang ditawarkan telah membuka ruang partisipasi publik, kuatnya *mindset* pendekatan tekno-birokratis dan politik akhirnya menggugurkan cita-cita perencanaan *bottom-up*. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari Institute for Research and Empowerment (IRE) memperkuat dugaan tersebut terhadap gagalnya implementasi Musrembang dari level dusun, desa sampai dengan Musrembang di tingkat kabupaten. Pahalanya, pembahasan hasil-hasil Musrembang desa ketika dibawa ke Musrembang kecamatan menjadi hilang tidak dibahas, terganti dengan pikiran elit-elit

---

<sup>3</sup> Lihat "*Review Pembangunan Pedesaan*", Tim IRE Yogyakarta, terdiri dari: AAGN Ari Dwiwijayana (Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM), Andi Sandi (Hukum Tata Negara, FH UGM), Arie Sujito (Sosiologi Fisipol UGM), Bambang Hidayana (Antropologi FIB UGM), Krisdyatmiko (Sosiologi Fisipol UGM) dan Sutoro Eko (Ilmu Pemerintahan, STPM "APMD" Yogyakarta). Diunduh dari [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org), 2008

<sup>4</sup> Eko, Sutoro & Krisdyatmiko, 2006. (ed). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. IRE, Jogjakarta (cetakan 1).

tingkat kecamatan dan para delegasi desa sendiri. Reduksi dan distorsi tersebut terus terjadi hingga di tingkat Musrembang Kabupaten.

Dugaan akar persoalan kusutnya praktek perencanaan pembangunan ini kembali pada faktor regulasi yang tidak sinkron dan konsisten antara satu dengan yang lain. UU No 32/2004 yang secara jelas telah membuka ruang partisipasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tidak diikuti dengan peraturan lainnya yang lebih jelas mengatur proses partisipasi. Perencanaan partisipatif yang bertingkat dari bawah tidak dihayati secara murni dan konsekuen, melainkan hanya dianggap sebagai prosedur yang harus dilewati semata. Nurcholish dkk (2008)<sup>5</sup> memaparkan pengertian perencanaan pembangunan partisipatif sebagai suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodogan (konversi), ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi. Pelibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Kategori kelompok yang terakhir ini dapat diwakili oleh organisasi, kelompok atau individu yang *concern* dengan kondisi normatif yang ideal, seperti kelompok mahasiswa, alim ulama, tokoh masyarakat pemuda, perempuan dan lain-lain.

Sesungguhnya di luar UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005 yang menghendaki pemerintahan desa menjadi kuat dan aktif<sup>6</sup>, juga terdapat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menitikberatkan pada aspek kewilayahan dan ekonomi. Sintesa

---

<sup>5</sup> Nurcholish, Hanif., dkk (2008), *"Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah"*. Gramedia: 2009

<sup>6</sup> Sutoro Eko, *"Otonomi Desa: Kebijakan, Pengalaman dan Perspektif"*. diunduh dari [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org), 2008

dari ke tiga kebijakan tersebut kemudian dapat ditemukan dalam Permendagri No. 51 Tahun 2007 yang memberikan pengertian baru dengan Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat yakni *pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan* Permendagri ini memperkenalkan konsep Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan pedesaan dan data profil desa dan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif (Sutoro Eko, dkk). Permendagri ini mengukuhkan kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan yang mewajibkan penerapan pembangunan basis Data Profil Desa dan Kelurahan secara Nasional. Profil Desa diharapkan menjadi wadah data dan informasi tentang Desa dan dapat menjadi basis data untuk melakukan pengembangan desa. Adapun komposisi data dasar Profil Desa yang digambarkan dalam regulasi ini, terdiri dari :

Tabel: 1 Komposisi data dasar Profil Desa

No.	Data Dasar Keluarga	Potensi Desa	Tingkat Perkembangan Desa
1.	Potensi SDM	Sumber daya alam	ekonomi masyarakat
2.	Perkembangan Kesehatan	Sumber daya manusia	pendidikan masyarakat
3.	Perkembangan Pendidikan	Sumber Daya Kelembagaan	kesehatan masyarakat
4.	Penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga	Data Prasarana dan Sarana	keamanan dan ketertiban
5.	Partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Data lembaga-lembaga yang ada di desa	Kedaulatan politik masyarakat

6.	Berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga	Data ekonomi desa	Peran serta masyarakat dalam pembangunan
7.	Perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya	Data perkembangan dan tingkat keamanan desa	Lembaga kemasyarakatan

Bila melihat tujuannya, penguatan data profil desa akan memudahkan pemerintahan desa dalam perencanaan dan penganggaran dalam bentuk: (a) metode perencanaan partisipatif, (b) analisis masalah dan potensi desa, (c) metode pemilihan skala prioritas kegiatan, (d) penyusunan anggaran dan belanja desa, dan (e) berkomunikasi melalui data yang akurat.

Basis data profil desa pada level sistem diharapkan dapat memperbaiki metode pengalokasian dana desa dan perbaikan sumber daya aparatur desa melalui perbaikan rekrutmen dan manajemen aparatur desa. Profil desa ini dapat mendorong pe-ningkatan kemampuan dalam mengelola pelayanan termasuk pengetahuan teknis administratif (format pelayanan administrasi) dan kemampuan memahami petunjuk maupun peraturan undang undang yang mendukung aparatur desa dalam memberikan pelayanan. Sementara pada level organisasi diharapkan dapat memberikan peningkatan manajemen keuangan desa, misalnya BUMDes sebagai sumber penerimaan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa dan kapasitas manajemen keuangan desa melalui penguatan kerjasama antar desa dalam bidang ekonomi dan berbagai pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan mekanisme akuntabilitas desa. Kondisi yang ingin dicapai oleh Profil Desa dapat dianggap sebagai keinginan dan upaya baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas data dasar.

Ironisnya, ketika indikator terus-menerus dikaji, proses pengolahan data dasar lebih sering dikoreksi, sistem pembangunan basis data disempurnakan, permasalahan sesungguhnya tetap belum tersentuh. Distorsi dalam proses perencanaan pembangunan

desa tetap berlangsung dan suara dari bawah hanya menjadi alat justifikasi politik anggaran pembangunan yang dimainkan oleh para elit di tingkat supra desa. Bagaimanapun, data dan informasi kependudukan desa merupakan hak publik warga desa yang seharusnya dapat memberikan manfaat untuk publik desa tersebut. Warga di desa harus memperoleh akses untuk mengetahui dan memahami data tersebut, menambahkan dan memperbaikinya. Mereka harus memperoleh data dan pemahaman tentang kualitas kesehatan dan pendidikan yang ada di desanya, dan bagaimana kondisi tersebut direspons oleh pemerintah melalui dana-dana bantuan yang dikucurkan. Mereka harus memperoleh akses tentang potensi desa dan kapasitas produksi yang ada saat ini, karena dari pemahaman atas kondisi dasar tersebut maka perubahan kualitas kesejahteraan ekonomi dapat mulai direncanakan secara sistematis. Diskripsi antara kebutuhan dengan ketersediaan harus terpapar dan menjadi instrumen bagi rakyat desa untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan perkataan lain, data desa harus menjadi instrumen untuk memasuki ruang akuntabilitas publik yang menjadi modal bagi demokrasi pemerintahan desa dan bagi komunitas desa untuk membangun kapasitas *self-governing*. Apakah sistem basis data Profil Desa yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat kepada desa telah memenuhi kriteria tersebut?

Laporan studi yang dilakukan oleh COMBINE Resource Institution setidaknya merekam keraguan yang tinggi dari perangkat desa tentang hal tersebut. Struktur modulnya yang terkunci hanya memungkinkan perangkat desa untuk menginput data yang diminta, tanpa peluang untuk menambah atau mengolah lebih lanjut. Selain itu, Profil Desa merupakan desain data yang bersifat umum yang harus dikumpulkan pada sebuah desa. Data yang diwadahi oleh Profil Desa ini juga tidak cukup elaboratif untuk menampung keunikan yang dimiliki dari data sebuah desa. Pun bila meninjau sistem pemutakhirannya, Profil Desa bersifat statik. Data diperbarui dalam selang minimal setahun sekali sehingga tidak mampu menjawab perkembangan dinamik dari masalah-masalah aktual desa. Keterbatasan pada sistem data di atas, kian diperparah dengan kenyataan bahwa sistem basis data Profil

Desa masih digunakan untuk melayani pemerintahan yang lebih tinggi. Hal tersebut menjadi bagian yang juga dikeluhkan oleh para perangkat pemerintah desa. Mereka beranggapan Profil Desa tidak mendukung kerja sehari-hari mereka, karena fitur-fitur yang tersedia lebih banyak ditujukan untuk melayani pelaporan satu arah ke pemerintahan di atas desa.

## **1.2 Proses menjadi buku**

Buku ini adalah kristalisasi dari catatan pengalaman lapangan yang ditulis secara rutin oleh pengelola program Lumbung Komunitas COMBINE sekaligus refleksi lembaga sejak saat bertemu dengan beberapa kepala desa di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Buku ini tersusun berdasarkan data-data yang terkumpul dari berbagai kegiatan selama mengembangkan dan melaksanakan program SID dimaksud. Data primer yang digunakan berasal dari sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2010 yang dirancang untuk mencapai tujuan sebagai berikut<sup>7</sup> :

1. Memahami perbedaan antara kedua sistem informasi yang ada, sehingga pengelola dan penerima manfaat sistem informasi dapat mengoptimalkan masing-masing aplikasi yang ada.
2. Evaluasi terhadap penerapan SID yang telah berlangsung dan memberikan masukan dan saran untuk optimalisasi sistem.
3. Memberi rekomendasi untuk keberlanjutan program dan penerapannya dalam lingkup yang lebih luas kepada para pihak terkait (Donor, Pemda, LSM), terutama dalam menerapkan pola-pola komplementer di antara keduanya.

Penelitian ini terfokus pada dua model Sistem Informasi Profil Desa dan Sistem Informasi Desa (SID). Oleh karena itu kajian yang sistematis akan dilakukan terhadap “teori” dan “praktek” yang dikembangkan oleh kedua sistem tersebut. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara bersamaan untuk men-

---

<sup>7</sup> Penelitian tersebut yang sebagian besar hasilnya tertuang di dalam buku ini, terlaksana atas dukungan dari Yayasan TIFA.

capai validitas dan reliabilitas penelitian. Pemilihan lokasi penelitian yakni di dua desa yang telah menerapkan SID, yaitu Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan Desa Nglegi, Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul, mengasumsikan bahwa dua desa ini terdapat peluang dalam pengembangan SID. Untuk menghindari kemungkinan bias pelaksana program dalam penelitian ini, maka sejumlah perangkat (*tools*) evaluasi akan lebih diarahkan terhadap teori dan praktek SID.

Tabel 1 menjelaskan Metode Pengumpulan Data studi tersebut.

No.	Metode Pengumpulan Data	Deskripsi	Keterangan
1.	<i>Desk Study</i>	Dokumen yang telah ditelaah adalah Profil Desa, SID, laporan bulanan, kuartalan, semesteran, Tahunan, akhir	Tim SID
2.	Observasi Partisipatif	Pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, mencatat perilaku kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, dan berusaha memahami situasi-situasi yang rumit/kompleks. Sedangkan peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh informan	2 desa (Terong & Nglegi)
3.	Wawancara	Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara semi struktur. Artinya pertanyaan yang diajukan kepada informan sebagian disusun terlebih dahulu (pedoman wawancara dan kuesioner) dan sebagian lagi diajukan secara terbuka di lapangan (kualitatif dan kuantitatif)	a) <i>Indepth Interview</i> 2 desa & 2 Pemda (Bantul dan Gunung Kidul) b) <i>Group interview &amp; individual interview</i> (2 desa)

4.	FGD	FGD dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih beragam dari stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) FGD dilaksanakan bersama pengelola program (CRI &amp; IDEA)</li> <li>b) FGD juga dilakukan di 2 desa (Terong &amp; Nglegi)</li> </ul>
5.	Review Pakar	FGD bersama para pakar & tokoh akademisi dibidang Profil Desa dan SID, pakar Teknologi Informasi dan Komunikasi, pakar sosial, juga pakar kebijakan di bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dilakukan untuk mendapatkan masukan, saran &amp; rekomendasi untuk pengembangan SID dalam lingkup yang lebih luas.</li> <li>b) Sebagai proses klarifikasi bersama terhadap pelaksanaan Profil Desa dan SID.</li> </ul>

Selain itu, data-data yang digunakan untuk menyusun buku ini juga berasal dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil pemikiran yang telah bergulir hingga hari ini untuk mengubah desa ke arah yang lebih baik. Untuk mengawal alur pemikiran, terutama konteks kebijakan tentang desa dari waktu ke waktu hingga hari ini dan pendekatan teoritik untuk mengadvokasi pelebagaan Sistem Informasi Desa, para penulis mendapat dukungan penuh dari R. Yando Zakaria<sup>8</sup>.

Meski diawali dari sebuah tanggapan untuk merealisasikan mimpi para perangkat desa, buku ini disusun untuk mengajak para pihak agar ikut terlibat mewujudkan mimpi kami yang lebih besar, yakni membangun sistem basis data dasar berdayaguna bagi seluruh lapisan masyarakat di desa. Sistem yang memungkinkan bagi rakyat untuk turut serta dalam proses memahami dan men-

---

<sup>8</sup> Selama ini R. Yando Zakaria dikenal sebagai antropolog yang memiliki perhatian intens pada masalah pembaruan desa dan agraria. Selain aktif menulis dan meneliti, ia juga seorang pegiat Lembaga non-pemerintah sejak tahun 1999.

ganalisanya, berpartisipasi dalam penyusunan dan pengambilan keputusan tentang rencana dan anggaran pembangunan komunitasnya. Sistem yang membantu mereka untuk mengusulkan dan merekomendasikan penyaluran dana bantuan yang dikelola oleh berbagai program pengentasan kemiskinan, mengoreksi kebijakan yang ada dan menggunakan basis data tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi komunitasnya.

### 1.3 Ringkasan buku

**Pada bab I**, terutama di bagian 1, kami mencoba menyajikan problematisasi data-data tentang desa dalam sistem perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Agar pembaca memahami konteks makro hingga permasalahan yang kami anggap harus dipecahkan, yaitu sistem data.

**Pada bab II**, bagian 1 kami menyajikan siklus perencanaan pembangunan yang diatur oleh kebijakan saat ini. Bagian 2 menceritakan tentang Sistem Informasi Desa (SID), baik secara konsep dan operasional

**Bab III**, di bagian 1 sampai 3 adalah Dinamika lapangan yang kami ambil dari studi kasus terhadap dua desa yang menjadi pilot penerapan SID. Pada bagian terakhir kami menjelaskan posisi SID dan apa yang kami harapkan dapat diperankan oleh SID di masa depan.

**Bab IV**, bagian 1 kami memaparkan teoritisasi dari penerapan SID sebagai model teknologi tepat guna. Di bagian 2 kami memetakan rencana advokasi untuk tujuan perluasan (*scaling up*) SID, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Bagian terakhir bab ini merupakan rekomendasi teknis untuk peningkatan kapasitas, di tingkat kebijakan, organisasi hingga individu.

**Bab V**, merupakan catatan penegasan COMBINE Resource Institution untuk memposisikan arah tujuan program SID di masa depan.



# MENGELOLA DAN MEMBERDAYAKAN SISTEM INFORMASI DESA

## 2.1 Siklus Perencanaan Pembangunan

*“Diberbagai forum ketika bicara tentang desa, muncul stigma bahwa desa identik dengan daerah terbelakang, kapasitas Pemerintah Desanya yang lemah, SDM rendah, dan ini dianggap sebagai sebuah masalah besar. Banyak kebijakan dan regulasi yang dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun itu tidak cukup membantu”*

(Sudirman Alfian, Kepala Desa Terong)

Posisi desa dalam konteks kebijakan nasional diatur oleh UU No. 32/2004 serta PP No. 72/2005. Bila ditinjau dari aspek kebijakan otonomi desa, UU No. 32/2004 menegaskan bahwa pengaturan mengenai desa mengandung beberapa prinsip dasar: otonomi asli, keragaman, demokrasi, partisipasi dan pemberdayaan<sup>1</sup>. Menurut Sutoro Eko, makna utama dari otonomi desa secara kelembagaan dan politik adalah kewenangan desa di tiga area:

1. Kewenangan asal-usul (*indigenous*) yang ada sebelum terbentuk NKRI yang diakui oleh negara.
2. Kewenangan atas urusan yang diserahkan oleh kabupa-

---

<sup>1</sup> Sutoro Eko (2008), op cit, hal 10

ten/kota. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 30/2006 tentang Tatacara penyerahan urusan dari kabupaten/kota ke desa.

3. Kewenangan dalam tugas pembantuan. Terkait dengan ini PP 72/2005 lebih lanjut menjelaskan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dalam pasal 10 ayat 3 ditegaskan bahwa Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

Namun sesungguhnya gagasan kelembagaan otonomi desa tidak pernah secara eksplisit menemukan ruhnya pada regulasi setingkat UU. Dalam telaahnya, Sutoro Eko memperlihatkan bahwa UU No. 32/2004 hanya memperlihatkan desa sebagai komplemen yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak ketiga. Dalam hal ini, PP No. 72/2005 jauh lebih maju dalam keberpihakannya dengan kewenangan desa untuk merencanakan sendiri pembangunan pedesaannya. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jangka lima tahun dan setiap tahun juga menyelenggarakan Musrenbang untuk menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Meski keberadaan RPJMDes yang menjadi prasyarat bagi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih problematis karena faktanya tidak ada satupun kabupaten/kota yang memberikan kewenangannya kepada desa hingga hari ini.

Di luar kedua regulasi tersebut, juga terdapat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menitikberatkan pada aspek kewilayahan dan ekonomi. Sintesa dari ke tiga kebijakan tersebut kemudian dapat ditemukan dalam Permendagri No. 51 Tahun 2007 yang memberikan pengertian baru tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat yakni pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat

meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan (Sutoro Eko, dkk). Permendagri No. 51/2007 memperkenalkan konsep Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan pedesaan dan data profil desa dan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif. Pengembangan PPTAD dilakukan untuk:

1. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;
2. Mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
3. Mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi menengah dan kecil, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan pedesaan;
4. Mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan pedesaan;
5. Mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan pedesaan; dan
6. Mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggung renteng dan sejenisnya.

Bila melihat runtutan kelahiran kebijakan regulasi, titik balik perubahan perencanaan pembangunan yang semula bersifat *top down* menjadi *bottom-up planning* justru dimulai dari terbitnya SE Mendagri No 050/987/SJ yang mengoreksi substansi Permendagri No 9/1982<sup>2</sup>. Substansi Surat Edaran ini yang telah melegalkan model *participatory planning* yang pelaksanaannya dapat dianggap sebagai respons atas tekanan dari skenario global tentang *good governance* (mensyaratkan partisipasi, transparansi

---

<sup>2</sup> Eko, Sutoro & Krisdyatmiko, 2006. (ed). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. IRE, Jogjakarta (cetakan 1).

dan akuntabilitas). Sejumlah regulasi dikeluarkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam membuat perencanaan pembangunan yang partisipatif di daerah masing-masing. Peraturan tersebut dimulai dari UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No 0259/M.PPN/I/2005-No. 050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2005 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tentang dan Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah. Di antara yang diatur tersebut adalah pelaksanaan Musrembang tingkat Desa/Kelurahan (yang dilaksanakan setiap bulan Januari), yang memiliki tiga tujuan yakni:

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya;
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya; dan
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrembang Kecamatan.

Penyelenggaraan MUSRENBANG Desa/ Kelurahan ini berada di bawah tanggungjawab Kepala Desa/ Lurah dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/ K) atau sebutan lain.

Dalam menetapkan daftar prioritas program/ kegiatan pembangunan, desa di haruskan menyesuaikan dengan rencana kerja pembangunan desa/ kelurahan (RKP Desa/ Kelurahan) dan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan dan kemampuan/ ketersediaan sumber anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah daerah, dan bantuan pemerintah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dise-

- lenggarakan di desa yang didanai dari alokasi APBD melalui SKPD selanjutnya disebut anggaran SKPD;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dengan ketentuan 30 % digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, dan 70 % digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa/ kelurahan;
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang didanai dari APBN.

Namun demikian hingga hari ini penerapan perencanaan pembangunan di tingkat desa masih menuai banyak kritik. Beberapa studi kualitatif yang mencermati proses pelaksanaan Musrenbangdes memberikan bukti sejumlah kelemahan sistem dan metodologi perencanaan daerah, yang justru memperlemah kemandirian dan kapasitas desa<sup>3</sup>. Senada dengan temuan tersebut, Sutoro Eko (2007) juga menyinggung adanya kesenjangan antara “hasil sektoral” dengan “proses spasial.” Perencanaan daerah sebenarnya menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat sektoral (pendidikan, kesehatan, prasarana daerah, pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan lain-lain), tetapi prosesnya menggunakan pendekatan spasial, yaitu melalui Musrenbang Desa dan kecamatan. Akibatnya, dalam Musrenbang Desa, masyarakat desa tidak mempunyai kapasitas untuk menjangkau isu-isu sektoral. Meskipun di wilayah desa terdapat prasarana pendidikan dan kesehatan, misalnya, masyarakat desa tetap tidak mempunyai kapasitas untuk menjangkau prasarana itu. Prasarana publik itu tetap dalam jangkauan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kapasitas masyarakat desa hanya menjangkau masalah prasarana

---

3 Lihat misalnya, Purnamasari, Irma., “*Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi*”. Tesis Program PascaSarjana Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro. Atau “Dilema Perencanaan Pembangunan Desa” di: <http://www.desaciburial.com/dilema-perencanaan-pembangunan-desa/>

fisik yang berada di lingkup kampung, sehingga setiap Musrenbangdes hanya mampu mengusulkan perbaikan prasarana fisik di lingkungan mereka. Masyarakat desa tidak mungkin menyampaikan usulan-usulan sektoral yang lebih luas. Kesenjangan dan ketidakmampuan masyarakat desa itu terjadi karena desa tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai sektor pembangunan.

Pendekatan partisipatif masih jauh dari optimal, dalam hal ini peran elite desa masih mendominasi kekuatan dalam menentukan kebijakan pembangunan desa. Pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan masih berkuat pada aktor pemerintahan desa dan lembaga-lembaga formal di tingkat desa (Kades dan Perangkatnya, BPD, PKK, LPMD, RT, dan RW). Sementara keterlibatan organisasi-organisasi sektoral, organisasi kemasyarakatan yang lain, dan kelompok perempuan masih sangat terbatas. Studi Purnamasari di kecamatan Cibadak bahkan secara terperinci memperlihatkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat saja. Selain itu dalam menentukan fokus perencanaan, masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat RT, sebagian besar proses penyelidikan tersebut terjadi di tingkat dusun. Secara umum anggapan kegagalan proses perencanaan pembangunan yang ada saat ini adalah penerapannya yang masih dihayati sebagai alat justifikasi semata untuk menunjukkan pola *bottom up* dan partisipatif telah dipraktekkan. Sebaliknya, proses perencanaan tidak menemukan sinkronisasi dengan implementasi program yang diturunkan ke desa. Hal ini telah menyebabkan akumulasi kekecewaan di banyak desa akibat perencanaan yang dibuat setiap tahun tidak direspons dengan program yang dialokasikan oleh kabupaten<sup>4</sup>. Belum lagi dampak distorsi yang berasal dari pendekatan yang diambil oleh program-program pembangunan yang ada, seperti pelaksanaan PNPM yang menempatkan unsur pemerintah desa sekedar sebagai fasilitator yang melayani kebutuhan pemerintahan yang lebih tinggi.

---

<sup>4</sup> Data wawancara terhadap fasilitator IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*), Jogjakarta, 2010

## 2.2. Sistem Informasi Desa Sebagai Tanggapan Atas Kebutuhan

*“Kalau dulu untuk mencari data penduduk menurut kelompok umur saja kesulitan karena tidak mempunyai databasenya. Dengan adanya SID menjadi lebih mudah”.*  
(Nuryanto, Kabag Pelayanan Pemdes Terong)

Gempa bumi 27 Mei 2006 yang meluluh lantakkan Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah merupakan pengalaman tak terlupakan bagi para perangkat desa. Saat itu sejumlah dokumen desa banyak yang tidak terselamatkan. Padahal, dalam upaya pemulihan paska bencana data-data kependudukan tersebut amat mereka butuhkan. Baik untuk penanganan di tingkat lokal, maupun untuk melayani permintaan dari pihak pemerintahan supra desa maupun dari institusi penyedia bantuan yang membutuhkan data penduduk desa. Berangkat dari pengalaman tersebut, perangkat desa dari wilayah selatan Yogyakarta yang mengalami dampak terbesar ini menyadari pentingnya memindahkan data arsip yang semula dalam bentuk *hard copy* menjadi *soft copy*. Namun demikian, baru pada tahun 2008 kebutuhan tersebut mendapatkan kesempatan untuk dibicarakan secara intens dengan COMBINE dan dijawab dengan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).

Sistem Informasi Desa yang pada awalnya disebut SIDESA hingga akhirnya menjadi SID memiliki dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas. Pada bidang pengertian yang luas ini terkandung misi organisasi COMBINE yang bercita-cita *memfasilitasi partisipan Jaringan COMBINE untuk mewujudkan komunitas-komunitas otonom, agar mampu menyelenggarakan proses pengambilan keputusan kolektif secara demokratis dan melakukan kontrol publik*

*secara efektif, melalui pengembangan sistem informasi komunitas yang mampu menghasilkan informasi yang strategis dan cerdas untuk kepentingan komunitas dan pihak-pihak yang menjadi mitra komunitas.*

Selain berangkat dari pengalaman di masa darurat dan pemulihan pasca bencana alam, kebutuhan atas sistem pendokumentasian data dasar juga telah menjadi fenomena umum di seantero negeri. Beberapa desa dari berbagai wilayah bahkan telah jauh hari memulai penggunaan sistem informasi yang berbayar, meski kemudian mereka harus menanggung konsekuensi penambahan beban keuangan desa. Di antara keterbatasan pilihan dan realitas kebutuhan yang harus dihadapi ini perangkat desa menerima keberadaan SID sebagai suatu keniscayaan. Sedangkan bagi COMBINE, memperkenalkan SID kepada perangkat desa adalah langkah awal untuk mendukung kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan komunitas desa.

Pada dasarnya, desa memiliki karakteristik tersendiri dalam hal komunikasi dan informasi kepada warganya. Sejak awal desa mempunyai sistem informasi yang berkembang dengan mekanisme papan pengumuman dan komunikasi lisan. Namun karena data terus berkembang dalam ukurannya maka dibutuhkan fasilitas lain untuk mengelola agar lebih konseptual dan sistematis. Sistem Informasi Desa (SID) sebenarnya tumbuh dalam merespon perkembangan lingkungannya, kini menjadi embrio yang mampu memberikan akselerasi tentang keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik. Namun demikian seperti yang diulas di awal bagian ini kelahiran SID berangkat dari kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas dalam menyimpan data, memanggil data dan mengolah data tentang desa. Aspek efektifitas dan efisiensi inilah yang menjadi penekanan latar belakang lahirnya SID.

Beberapa alasan yang mewarnai lahirnya SID, antara lain:

1. Dokumen-dokumen desa banyak yang tidak terselamatkan pada saat gempa, sehingga ada kebutuhan untuk mengubah bentuk arsip dari *hardcopy* menjadi *softfile*;
2. Ada kebutuhan untuk memanggil/menemukan data secara cepat
3. Beberapa desa sudah pernah memulai dengan menggunakan sistem yang berbayar, namun hal tersebut dirasa membebani keuangan desa;
4. Banyaknya permintaan dari pemerintahan supra desa yang meminta data ke desa, namun tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang cepat.

*“Awalnya ada keinginan dari Pemerintah Desa Balerante<sup>5</sup> yang berharap pelayanan pemerintah desa bisa seperti pengunjung rumah sakit yang ingin mencari data pasien rawat inap, tinggal ketik nama di komputer, maka data akan keluar”*

(Mart Widarto, Pengelola Program Lumbung Komunitas-CRI)

Sistem Informasi Desa pada akhirnya menuju pada suatu titik dalam menyelesaikan persoalan data yang dihadapi pemerintahan desa secara lebih baik. Bukan hanya untuk kebutuhan yang sifatnya internal, namun terlebih-lebih banyaknya kebutuhan dari luar termasuk pemerintah supra desa yang seringkali meminta data desa dengan berbagai macam kepentingannya. Kebutuhan inilah yang menjadi proses tumbuh keberadaan SID, yang melahirkan sebuah *software* dan mulai dikenalkan kepada desa pada pertengahan Juni 2009 di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Jawa Tengah dan pada awal 2010 di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul DIY.

---

<sup>5</sup> Nama salah satu desa di Kec. Kemalang Kab. Klaten Jawa Tengah

## Bagan 1 : Alur sejarah pengembangan SID



Dalam perkembangannya, secara bertahap keberadaan SID disambut positif oleh Pemerintah Desa, mengingat program ini memberikan manfaat yang nyata dalam rangka menyelesaikan masalah pendataan dan pelayanan publik yang ada di desa. SID telah menjadi sesuatu bernilai ketika realisasinya mulai menyentuh kegiatan-kegiatan sehari-hari pemerintah desa terutama dalam pengurusan surat-surat tertentu dan kebutuhan lainnya, misalnya dalam kegiatan posyandu, klinik desa, dan kegiatan terkait dengan pembangunan desa. Jejak-jejak SID telah memberikan langkah pasti untuk menjadikan sistem informasi desa itu sebagai sesuatu yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Secara struktur layaknya sebuah sistem informasi, maka pada awalnya desain program SID dikembangkan dengan menggunakan 3 user dalam pengelolaan sistem ini. Ketiga user tersebut yaitu :

1. *Super Admin* : Mereka yang bisa melakukan perubahan database maupun program
2. *Administrator* : Mereka yang bisa melakukan *updating* data

3. Warga secara lebih luas : Yang terbatas hanya bisa melihat akun mereka, namun tidak bisa melakukan *editing*.

Wajah seperti apa SID itu sangat bergantung dengan konteks permasalahan di masyarakat desa. Sehingga bisa jadi sebuah desa tertentu berbeda dalam implementasi pengelolaan data. Ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas utama masyarakat desa tersebut. Desain maupun standarisasi, baik teknis (konten) maupun substansi (tahapan, proses, metode, output, dampak) yang dibuat oleh pengelola program dalam melaksanakan program SID akan mengikuti kebutuhan masyarakat desa. Kegiatan penyempurnaan sistem informasi desa lebih banyak bersifat mengalir, tergantung kebutuhan di lapangan. Namun pada prinsipnya ada tahapan-tahapan yang mendasar sebagaimana sebuah sistem informasi yang sangat bergantung pada diagram konteksnya untuk implementasi yang memang biasa dilakukan oleh pemerintahan desa bekerjasama dengan COMBINE untuk memulai pelaksanaan program SID.

Bila mengikuti perjalanannya sejak tahun 2009-2011 maka teridentifikasi ada 8 (delapan) alur tahapan yang sistematis, namun dengan level intensitas yang disesuaikan kebutuhan, yaitu:

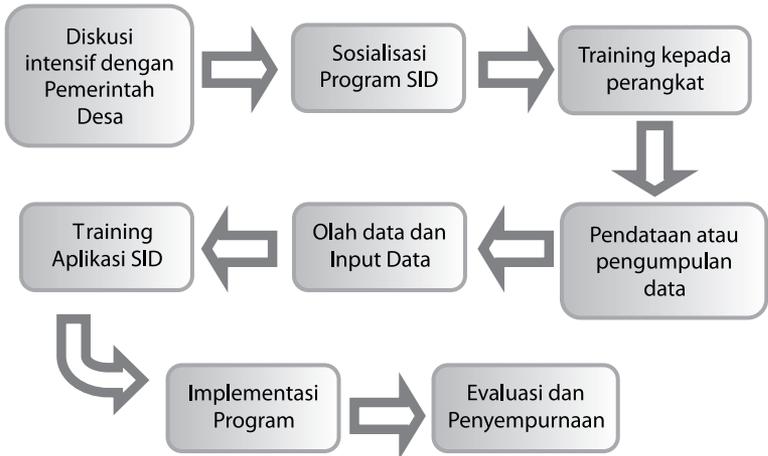
1. **Diskusi intensif:** yang dilakukan di awal program dimaksudkan sebagai upaya menghimpun kebutuhan-kebutuhan pemerintah desa maupun komunitas dalam arti luas, agar bisa dijadikan konten dalam sistem. Diskusi ini biasanya akan menghasilkan list daftar kebutuhan serta metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan program, dari kegiatan pendataan hingga tahap implementasi maupun publikasi kepada masyarakat luas.
2. **Sosialisasi Program SID:** dilakukan kepada seluruh masyarakat, bisa menggunakan media pertemuan warga, radio komunitas, papan pengumuman, dan lain-lain. Kegiatan ini dimaksudkan agar warga bisa turut berpartisipasi dalam proses pembangunan sistem ini, dan partisipasi yang minimal bisa dilakukan adalah membantu memberikan data.
3. **Training:** kepada perangkat dilakukan sebagai upaya

memperkenalkan *software* yang ada kepada perangkat Pemerintah Desa, untuk mendapat masukan atau penambahan konten serta pengenalan awal tentang manfaat serta teknik pengaplikasian.

4. **Pendataan/pengumpulan data:** dilakukan dalam rangka mengisi konten. Data yang dimasukkan bisa berupa data yang memang sudah tersedia di pemerintah desa, namun bisa pula dilakukan pendataan baru agar data yang diperoleh bisa lebih kaya dan valid. Proses ini bisa dilakukan oleh perangkat desa melalui struktur pemerintahan yang ada di desa, namun bisa juga dilakukan oleh masyarakat dengan metode yang sudah disepakati bersama.
5. **Olah data/input data:** biasa dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas yang cukup dalam pengoperasian komputer. Bisa dilakukan oleh lembaga Karang Taruna, maupun oleh warga yang dinilai mampu. Proses input data ini mensyaratkan adanya sejumlah komputer sehingga proses input bisa dilakukan secara cepat.
6. **Training aplikasi SID:** dilakukan setelah seluruh data sudah masuk ke dalam sistem dan sudah siap dioperasikan. Training ini biasa dilakukan kepada petugas yang biasa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi mengingat pengoperasiannya yang cukup sederhana, biasanya training juga bisa melibatkan perangkat desa lainnya, sehingga apabila bagai pelayan berhalangan hadir, proses pelayanan publik tetap bisa berjalan dan diperankan oleh perangkat yang lain.
7. **Implementasi program** merupakan tahapan pengoperasian program SID untuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang menggunakan sistem ini pastinya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan yang manual.
8. **Evaluasi dan penyempurnaan** terus dilakukan dalam rangka melengkapi maupun memperbaiki sistem yang sudah ada. Hanya saja terhubung SID masih sebatas aplikasi belum menjadi sistem yang lebih luas, seringkali proses evaluasi dan penyempurnaan pun masih sebatas

hal-hal yang bersifat teknis, belum pada substansi, misalnya pemanfaatan data oleh komunitas, maupun metode yang bisa digunakan untuk memaksimalkan manfaat dari SID.

Bagan 2 : Alur Pelaksanaan Program SID oleh CRI



Bagan di atas sebenarnya menggambarkan bagaimana SID telah dirancang secara detail oleh COMBINE melalui tahapan kegiatan yang sistematis.

Beberapa tahapan kegiatan dalam pelaksanaannya secara teknis disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintahan Desa (Pemdes) sebagai struktur pemerintahan terbawah dalam tata pemerintahan di Indonesia selama ini seringkali mengeluhkan soal pelayanan, baik yang bersifat struktural kepada pemerintahan supra desa, maupun pelayanan publik kepada warganya. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik orang maupun kapasitas keuangan desa tidak jarang membuat desa harus memberikan pelayanan yang seadanya kepada pihak luar. Sadar akan berbagai kelemahan ini lah yang mendorong pemerintah desa mencoba untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan

good governance dan otonomi desa melalui berbagai upaya pe-nataan, baik di level sistem, kelembagaan maupun individu dari perangkat desa.

Berangkat dari tujuan awal pembangunannya untuk memper-baiki kualitas pelayanan publik pemerintah desa, dan untuk itu dibutuhkan data-data yang akurat, maka data awal yang digu-nakan oleh pemerintah desa adalah form Profil Desa. Sesung-guhnya kebutuhan data yang ada di form tersebut sudah sangat lengkap, terutama Data Dasar Keluarga (DDK) serta kepemilikan aset.

Selain data yang berasal dari profil desa, proses pendataan dari rumah ke rumah juga dilakukan oleh Ketua RT yang melibatkan 1 orang pendamping yang berasal dari karang taruna. Proses pen-dataan dari rumah ke rumah ini dinilai efektif mengingat ketika berada di rumah, biasanya pendata akan bertemu langsung de-ngan kepala keluarga dan didampingi oleh pasangannya, sehing-ga data yang diperoleh dinilai lebih akurat serta kepala keluarga bisa menunjukkan kartu keluarga untuk membantu mempercep-at proses pendataan.

Namun disisi yang lain, proses pendataan dengan metode ini ternyata juga ada kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Masih belum cukup terbukanya penduduk dalam men-yampaikan data, terutama terkait dengan kepemilikan aset
2. Adanya kesulitan untuk menemui warga
3. Pengetahuan *enumerator* yang terbatas berdampak pada masih adanya data yang tidak tergalil pada proses penda-taan dikarenakan persiapan yang tidak dilakukan secara mendalam, sehingga dikeluhkan tentang masih adanya data-data yang dinilai tidak valid.

### **2.3 SID untuk merevitalisasi Profil Desa**

Profil Desa yang diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan pendataan desa hingga kini masih belum menjanjikan banyak

manfaat, bahkan untuk tingkat perangkat desa. Telah disinggung di bab sebelumnya keterbatasan Profil Desa tersebut, terutama pada kapasitasnya untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak adanya keterhubungan antar data. Dengan perkataan lain, data masih dalam bentuk tunggal, belum mengalami agregasi dan tidak terolah dalam bentuk data sekunder sehingga tidak dapat dilihat deskripsi datanya dalam bentuk tren maupun komposisi. Laporan penelitian COMBINE terhadap pemanfaatan Profil Desa sendiri mengarah pada kesimpulan adanya tingkat kesulitan tertentu yang harus dihadapi oleh pemerintah desa dalam membangun data dasar Profil Desa tersebut.

Berbagai masalah yang terungkap, diantaranya:

1. Banyaknya data yang harus digali dan diinput ke dalam profil desa, dan untuk ini membutuhkan sumber daya yang cukup termasuk keuangan desa;
2. Data tidak bisa dimanfaatkan secara optimal serta software yang ada tidak mendukung untuk memanggil data secara cepat;
3. Profil Desa tidak bisa digunakan untuk pelayanan publik di tingkat desa;
4. Data dalam Profil Desa tidak saling terhubung satu sama lain, dan
5. Tidak ada pendampingan dari pemerintah desa dalam pembuatan Profil Desa.

### **2.3.1. Konsep dan Konten Profil Desa**

Desa seringkali diibaratkan sebagai negara kecil, yang dilekatkan dengan kewenangan *distributive* pemerintahan supra desa kepada pemerintah desa. Bentuk kewenangan ini secara nyata adalah banyaknya urusan yang dilimpahkan ke desa, diantaranya berupa pendataan, pencatatan hingga pengolahan dan penyajian data. Pemerintah menyadari bahwa desa sudah saatnya memiliki sistem data dan informasi yang akurat, agar mengetahui tingkat perkembangan desa dan kekayaan aset yang dimilikinya. Data dan informasi yang ada akan sangat membantu bukan hanya bagi pemerintah desa melainkan bagi pemerintah kabupaten

dan pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan tentang desa. Kebutuhan akan *collecting* dan integrasi data ini lah yang mendasari lahirnya Pasal 65 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana salah satu bentuknya adalah profil desa.

Profil Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, memiliki banyak konten/isi yang terkait dengan data desa, dimana keseluruhan data dan informasi tersebut haruslah terdokumentasikan dengan baik di tingkat desa, agar dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan desa. Konten profil desa memang terbilang lengkap, dimana terdapat 3 kategori penting di dalamnya, meliputi: **data dasar keluarga, potensi desa hingga tingkat perkembangan desa**. Masing-masing konten besar tersebut memiliki kekayaan data dengan turunannya yang cukup beragam juga (*Lihat Bab I hal; 5 : Komposisi data dasar Profil Desa*). Data-data yang ada ini merupakan kumpulan dari berbagai aset lokal yang ada di tingkat desa, yang seringkali terlupakan dan tidak dimaknai sebagai potensi yang dapat menguntungkan bagi desa dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, bukan pekerjaan mudah untuk menghimpun keseluruhan data yang disyaratkan harus ada di dalam profil desa. Terhitung sudah sekitar 5 tahun aturan teknis mengenai profil desa dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri, namun dalam kurun waktu yang cukup lama ini, belum banyak desa yang sudah memiki profil desa secara utuh sebagaimana dikehendaki oleh Permendagri No. 12 Tahun 2007.

Pemerintah desa sebagai institusi yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan dan pengorganisasian data, memiliki kewajiban untuk melalui beberapa tahap yang sudah ditentukan dalam pembuatan profil desa, yaitu:

1. *Tahap penyiapan instrumen pengumpulan data*

Pada tahapan ini, pemerintah sudah menyiapkan daftar isian yang cukup detail berisi berbagai data yang harus

diisi oleh pemerintah desa, sehingga pemerintah desa nantinya hanya bertugas untuk melengkapi isian dari form yang sudah tersedia tersebut.

2. *Penyiapan kelompok kerja profil desa;*  
Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membentuk kelompok kerja profil desa, yang nantinya bertugas untuk melaksanakan agenda pembuatan profil desa. Kepala desa menjabat sebagai penanggungjawab dari pokja ini, sedangkan ketua pokja dirangkap oleh sekretaris desa. Keanggotaan pokja terdiri dari perangkat pemdes, civil society maupun aparat perangkat daerah yang ada di desa dan kecamatan.
3. *Pelaksanaan pengumpulan data;*  
Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh pokja profil desa, yang biasanya dilakukan dengan metode survei. Bagi desa yang sudah memiliki data, biasanya hanya tinggal memindahkan data yang ada ke dalam form atau langsung dimasukkan ke dalam software yang sudah tersedia. Namun ada juga yang melakukan pendataan ulang karena ketidaklengkapan data atau untuk memperoleh data yang akurat.
4. *Pengolahan data;*  
Tahapan ini dilakukan juga oleh pokja profil desa, dimana data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa guna mendapatkan data terkait tingkat kemajuan desa. Tahap pengolahan data dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat provinsi.
5. *Publikasi data profil desa.*  
Tahap akhir dari kerja panjang pokja profil desa adalah publikasi data, dimana profil desa yang sudah selesai dikerjakan selanjutnya disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa.

Berbagai tahapan ini lah yang harus dilalui oleh desa guna menghasilkan profil desa, dengan harapan ketersediaan data dan informasi tentang desa, akan memudahkan dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan desa.

### 2.3.2. Problematika Kebijakan tentang Profil Desa

Proses penyusunan Profil Desa sebagaimana diisyaratkan diatas, ternyata bukan pekerjaan yang mudah, mengingat banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Secara terbuka pemerintah desa mengeluhkan banyaknya kendala atau hambatan yang dihadapi, diantaranya:

**Pertama**, kapasitas perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang rendah masih menjadi kendala terbesar dalam membuat profil desa. Di Jawa sebagai pulau yang selama ini relatif dekat dengan episentrum kekuasaan, dimana pelayanan publik cukup tersedia dan mampu diakses oleh masyarakat, faktanya tingkat pendidikan perangkat desa memang rata-rata hanya tamat SLTA saja. Tidak banyak perangkat desa yang menempuh pendidikan hingga level perguruan tinggi, apalagi dengan disiplin ilmu yang khusus dalam bidang informasi dan teknologi.

**Kedua**, beragamnya konten dalam profil desa yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan dalam waktu yang singkat. Profil Desa mewajibkan pemerintah desa untuk menyediakan berbagai kebutuhan data yang berjumlah puluhan bahkan apabila dijabarkan lebih detail lagi hingga lebih dari ratusan data yang harus ada dalam profil desa. Bukanlah pekerjaan mudah bagi pemerintah desa dengan segala keterbatasan, baik ketersediaan perangkat desa, kapasitas keuangan hingga instrumennya.

**Ketiga**, lemahnya supervisi dan fasilitasi dari pemerintah supra desa terhadap desa dalam pelaksanaan pembuatan profil desa. Pembuatan profil desa bukan pekerjaan yang mudah, melainkan merupakan "hajatan" besar pemerintah desa dalam rangka memenuhi kebutuhan data dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Sayangnya, tugas pembantuan dalam pembuatan profil desa tersebut tidak dibarengi dengan skema pendampingan maupun fasilitas yang jelas dari pemerintah kabupaten sebagai institusi yang langsung berada di atas desa. Desa hanya diberikan sebuah CD yang berisi *software* saja, tanpa dipandu lebih jauh untuk pengisiannya. Beberapa masalah yang ditemui

di tingkat pemerintahan desa, pada akhirnya bermuara pada pemaknaan yang sempit tentang profil desa. Pemerintah desa, hingga saat ini masih memaknai profil desa sebagai kewajiban desa, bukan sebagai kebutuhan yang dapat dirasakan oleh desa.

Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa profil desa masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

1. Profil desa masih dimaknai sebagai kewajiban baik oleh pemerintah desa sendiri maupun oleh struktur pemerintahan di atasnya. Profil desa sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekedar kewajiban, dimana data dan informasi ini akan sangat berguna bagi desa dalam membuat perencanaan desa, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disinyalir karena profil desa lebih merupakan instruksi dari pusat dalam rangka pemenuhan kebutuhan data tentang desa.
2. *Software* yang tersedia untuk profil desa ternyata tidak cukup membantu pemerintah desa dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik di desa. *Software* yang ada masih sangat kaku, dimana data yang satu dengan data lainnya tidak terhubung, sehingga cukup menyulitkan dalam proses *input* data.
3. Profil desa lahir sebagai sebuah proses yang *top down*, dari pemerintah pusat ke desa dalam skema kewenangan *distributive*, namun tidak diimbangi dengan *supervisi* dan *fasilitasi* dari pemerintah *supra* desa.
4. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam desain pembuatan profil desa. Banyak masyarakat desa yang tidak tahu menahu tentang profil desa, mengingat tidak adanya konsep partisipasi dalam pembuatan profil desa. Tanpa keterlibatan masyarakat, bukan tidak mungkin data yang tersedia lemah akurasi, mengingat hanya dilakukan oleh pihak pemerintah desa saja dengan segala keterbatasan yang dimiliki.
5. Sebagai sebuah ide untuk merangkum data dan informasi yang ada di tingkat desa, profil desa memang memiliki konten yang kaya dan menarik. Segala aset lokal yang ada terhimpun dan tercatat di dalam profil desa, yang

seharusnya dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Bila dibandingkan dengan Profil Desa, SID menawarkan sejumlah penyempurnaan. Bagi perangkat desa, profil desa dinilai masih belum banyak menjawab kebutuhan desa akan ketersediaan data maupun pemanfaatan data untuk pelayanan publik. Secara umum, tabel berikut mencoba menjelaskan tentang desain Profil Desa dan SID secara konseptual, dan apa yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini sebagian besar merupakan hasil pelaksanaan studi.

Tabel 3: Perbandingan Desain Profil Desa dan SID

Aspek	Profil Desa	SID
Pengertian	Gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.	Suatu rangkaian/ sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas
Inisiatif Pembuatan	Perintah regulasi ( <i>Top Down</i> )	Berasal dari Kebutuhan Desa ( <i>Bottom Up</i> )
Konten/Isi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Dasar Keluarga</li> <li>2. Potensi Desa</li> <li>3. Tingkat Perkembangan Desa</li> </ol>	Disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat desa
Metode Pengumpulan Data	Dilakukan oleh Pemerintah Desa secara instruktif	Dapat dilakukan dengan metode partisipatif

Tujuan	Untuk ketersediaan data dan informasi desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk ketersediaan data dan informasi desa</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan public</li> </ol>
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyiapan instrumen pengumpulan data;</li> <li>2. penyiapan kelompok kerja profil desa/kelurahan;</li> <li>3. pelaksanaan pengumpulan data;</li> <li>4. pengolahan data; dan</li> <li>5. publikasi data profil desa dan kelurahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan penyusunan program kerja</li> <li>2. Sosialisasi</li> <li>3. Training <i>software</i></li> <li>4. Pendataan</li> <li>5. Input dan Olah Data</li> <li>6. Training aplikasi</li> <li>7. Implementasi pelayanan</li> <li>8. Publikasi</li> </ol>
Struktur Kelompok Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;</li> <li>2. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan; dan</li> <li>3. anggota terdiri dari perangkat desa/kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan para kader pemberdayaan masyarakat serta aparat perangkat daerah yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan.</li> </ol>	Kelompok kerja dibentuk secara partisipatif
Mekanisme pelaporan	Dilakukan secara berjenjang	Pelaporan dilakukan kepada pemerintah desa dan masyarakat luas
Media Publikasi	Publikasi dilakukan melalui surat dinas, publikasi media cetak dan elektronik, publikasi digital website dan teknologi informasi pemerintahan lainnya	Memanfaatkan media apapun yang ada di desa

Karakteristik SID di bawah ini akan menjadi peluang bagi pengembangan sistem informasi tentang desa kedepan. Sifat dasar inilah yang akan membedakan SID dengan sistem-sistem yang telah ada selama ini.

**1. Sederhana dan Terintegrasi**

SID didesain dengan sederhana, namun penghubung antar muka (*interface*) komponen SID bertugas untuk menjembatani hubungan antar komponen, sehingga setiap komponen dapat berinteraksi dan berkomunikasi dalam rangka menjalankan fungsi masing-masing komponen. Tampilan data statistik pada SID tidak sekadar hasil penghitungan jumlah, namun dapat terhubung dengan data dasar. Sebagai contoh, jumlah penduduk yang menyelesaikan SD terhubung dengan data dasar penduduk, seperti nama, usia, NIK.

**2. Lengkap**

SID bekerja dengan cara mengolah basis data kependudukan yang terdiri dari data wilayah, data keluarga, data penduduk, statistik penduduk (9 kategori), pengu-rusan surat-surat, pencarian, keuangan, sumberdaya. SID juga dilengkapi dengan modul keuangan atau kas desa, termasuk didalamnya kas yang masuk dari biaya pengu-rusan surat administrasi yang terhubung langsung dengan data penduduk.

**3. Fitur pencarian yang memenuhi kebutuhan**

SID memenuhi kebutuhan administrasi desa/kelurahan karena dilengkapi oleh basis data dan bagian pengolah yang mampu mengolah data dengan baik untuk memenuhi segala kebutuhan informasi secara mudah sehingga memudahkan monitoring terhadap jalannya pemerintahan desa/kelurahan. Sistem ini menyediakan fitur pencarian single dan multi kategori, mulai dari nama, rentang umur, RT, dusun, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, golongan darah, yang bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan untuk pencarian penduduk yang lebih spesifik.

**4. Cepat dan mampu memverifikasi data dasar**

SID dilengkapi dengan fitur pengurusan surat-menyurat

untuk kebutuhan SKCK, Surat Keterangan Penduduk, Surat keterangan Miskin, dan surat keterangan jaminan kesehatan dan sosial (Jamkesmas) dalam format tampilan yang siap untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan penduduk tidak kurang dari 2 menit. Pengisian nama penduduk langsung terhubung dengan data dasar, sehingga proses verifikasi dapat terjadi saat itu juga. Verifikasi tersebut akan mengkonfirmasi keberadaan penduduk tersebut, atau kemungkinan jika identitas penduduk yang bersangkutan belum dimuktahirkan.

#### **5. Format tampilan yang bervariasi**

Data statistik penduduk di dalam SID dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk kategori pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, agama, jenis kelamin, golongan darah juga dapat dilihat di *Front-end* SID / website. Website juga menyediakan informasi desa dalam bentuk berita, audio, text, foto, video

#### **6. Statistik penduduk**

SID menyediakan data statistik penduduk lengkap untuk memudahkan user dalam membaca data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data tersebut meliputi jumlah laki-laki dan perempuannya untuk kategori pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, agama, jenis kelamin, golongan darah, kategori miskin, dan jamkesmas.

#### **7. Aman dan Mudah diperbaharui dan disimpan**

Pengarsipan dalam flas disk atau CD yang dilakukan secara periodik dapat mengamankan keberadaan data base. Selain itu, aplikasi SID yang terkoneksi dengan web memudahkan data base untuk diperbaharui kapanpun dan dimanapun.

#### **8. Aplikasi Terbuka sehingga dapat dikembangkan**

SID merupakan aplikasi terbuka (*Open Source*) dan tidak berbayar. Dengan demikian, pengelola diberi peluang untuk mempelajari *software* tersebut dan mengembangkan modul-modul di dalamnya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, di wilayah rawan bencana, SID dapat menyediakan data wilayah penyebaran pe-

ngungsi lengkap dengan data penduduknya.

### 9. *Asistensi Teknis*

Penguasaan teknologi oleh SDM merupakan prasyarat dalam penerapan SID. Oleh karena itu, pendampingan paska pemasangan *software* menjadi aktivitas yang krusial.

Kebermanfaatan SID diproyeksikan dapat mencakup seluruh komponen yang ada di desa. Tabel di bawah ini memperlihatkan manfaat SID berdasarkan fungsi maupun aktornya.

Tabel 4. Manfaat SID Berdasarkan Fungsi

Komponen	Manfaat SID
Pemerintahan	Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis kebutuhan di tingkat lokal. Adanya ketersediaan data yang bisa dimanfaatkan di tingkat lokal maupun supra desa
Pembangunan	Membantu proses perencanaan dan sebagai kekayaan data dalam menyusun dokumen perencanaan desa Mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan di tingkat desa
Pemberdayaan	Mendorong partisipasi dan lahirnya inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa

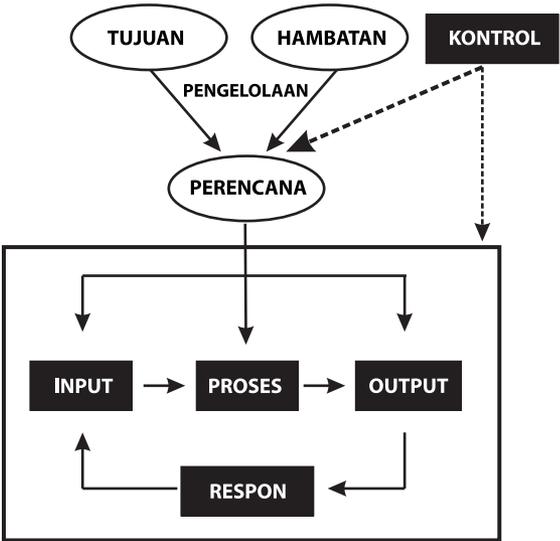
Tabel 5. Manfaat SID Berdasarkan Aktor

Komponen	Manfaat SID
Pemerintahan Supra Desa	1. Kemudahan dalam memperoleh data dan informasi desa 2. Efisiensi anggaran SKPD pada komponen perjalanan dinas 3. Efektifitas kerja 4. Membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten
Pemerintah Desa	1. Ketersediaan data dan informasi secara lengkap dan tertata 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan 3. Membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat desa

	4. Apabila SID bersifat <i>online</i> maka akan membantu dalam mempromosikan desa
Lembaga-lembaga Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebutuhan dan program kerja menjadi lebih mudah karena ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses</li> <li>2. Membantu kerja-kerja kelembagaan baik sektoral maupun spasial (kewilayahan)</li> </ol>
Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa</li> <li>2. Menumbuhkan modal sosial</li> </ol>
Pihak-pihak diluar yang berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu mempercepat pihak-pihak terkait yang membutuhkan data dan informasi tentang desa</li> <li>2. Pihak luar memiliki potret tentang kondisi desa yang bisa diakses dengan mudah</li> <li>3. Apabila SID tersedia dalam bentuk <i>online</i>, maka akan membuka relasi antara pihak-pihak di luar desa dengan desa</li> </ol>

Sebagaimana sistem informasi lainnya, Sistem Informasi Desa dapat berjalan dengan serangkaian tahapan pembangunan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Bagan 3 : Tahapan Pembangunan Sistem



Bagan di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah sistem ada tujuan yang hendak dicapai, namun tidak sedikit pula hambatan-nya. Tujuan dan hambatan tersebut akan dikelola guna dijadikan input. Kontrol sistem akan berpengaruh pada input, proses dan output. Input yang masuk akan diproses dan diolah sehingga menghasilkan output. Dengan adanya output akan dianalisis dan dievaluasi dari penerima manfaat untuk menjadi input selanjutnya.

Hal ini juga terjadi pada pembangunan SID, dimana ada elemen-elemen yang sama di dalamnya, ada tujuan, faktor-faktor penghambat atau keterbatasan, kontrol, input, proses, output dan juga respon dari masyarakat yang selanjutnya akan dikelola sebagai bahan untuk input lagi, dan seterusnya.

Munculnya ide tentang SID, berawal dari adanya berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa, diantaranya:

1. Inkonsistensi data
2. Sulitnya mengakses/memanggil data secara cepat dan mudah
3. Keamanan data
4. Kesatuan data

**Tujuan** dimaksudkan sebagai arah yang ingin dicapai dari sebuah sistem, guna mengatasi atau menyelesaikan masalah yang ada. Kaitannya dengan SID, tujuan dari SID sebagaimana yang diharapkan oleh desa, antara lain:

1. Ketersediaan data
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Pengelolaan seluruh potensi desa
4. Mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas
5. Memperkuat modal sosial

**Hambatan** merupakan faktor-faktor yang berpotensi membatasi proses pembangunan sistem. SID pun tidak luput dari adanya hambatan dalam upaya pembangunannya. Hambatan dalam membangun SID, antara lain:

1. Kapasitas perangkat Pemdes

2. Ketersediaan data awal
3. Keterbatasan sarana
4. Anggaran

**Input** merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima seluruh masukan data. Dalam SID, input diantaranya berupa Data Dasar Keluarga (DDK), data aset, potensi yang dimiliki oleh desa maupun dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh desa, diantaranya Perdes, APBDes, RPJMDes, dan lain-lain.

**Proses** adalah kegiatan berupa pengolahan seluruh masukan data menjadi suatu informasi yang berguna. Pemanfaatan data yang sudah diinput dalam program SID dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana yang menjadi tujuan SID. Pada tahap ini, proses pengolahan data bukan hanya berada di tangan pemerintah desa saja, melainkan juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh komponen yang ada di desa, baik kelompok-kelompok sektoral, spasial maupun seluruh masyarakat luas.

**Output** diartikan sebagai hasil dari input yang telah diproses oleh sebagian pengolah dan merupakan tujuan akhir sistem. Output bisa berupa kompilasi data, laporan bersifat grafik, diagram dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk melihat kecenderungan atau trend yang berkembang dari data. Misalnya, data kecenderungan pergeseran angka kemiskinan yang ada di desa, atau komposisi masyarakat berdasarkan kelompok umur, dan lain-lain.

**Respon atau Umpan Balik** merupakan elemen dalam sistem yang bertugas mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan, dimana tahap ini sangat penting demi kemajuan sebuah sistem. Fase ini nantinya bisa berupa perbaikan sistem, pemeliharaan sistem dan sebagainya. Terkait dengan SID, respon bisa dari berbagai pihak, internal maupun eksternal desa, namun yang lebih penting adalah internal desa, dimana masyarakat bisa memberikan evaluasi atau respon atas output yang ada. Bisa dicontohkan seandainya output dari sebuah sistem adalah data tentang semakin tingginya angka kemiskinan yang ada di

desa, maka dengan adanya respon dari pemdes atau masyarakat, maka didesainlah program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat desa, dan program tersebut nantinya akan masuk kembali menjadi input, dan terus berputar dalam siklus tersebut menuju penyempurnaan.

**Kontrol** adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan bentuk kontrol yang baik terhadap *input, output*, pengolahan data maupun umpan balik, yang akan sangat berperan dalam semua rangkaian sistem.

Dalam perkembangannya, pemanfaatan SID pada fase yang paling awal adalah menyediakan **informasi** bagi pemerintah desa dan masyarakatnya. Bagi perangkat desa konten SID bisa digunakan untuk menyusun/mengkaji dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa (RPJM-DES, APB-DESA) dengan menggunakan data kependudukan, pendapatan dan sumber daya lainnya. Sedangkan bagi masyarakat, SID mampu menjadi basis data atau sumber pengetahuan terhadap pembangunan di desanya.

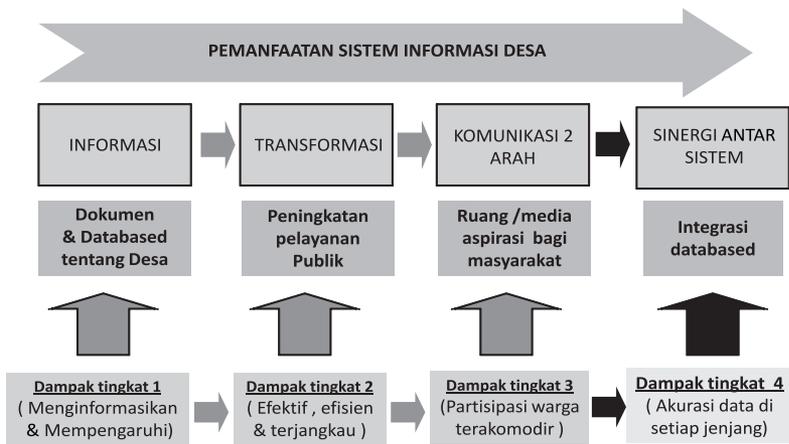
Pada fase kedua, SID bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Bagi pemerintah desa, dengan adanya SID mampu mendukung proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Bagi masyarakat, mereka akan memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, akurat dan terjangkau. Pada fase ini SID mampu melakukan **transformasi** bagi desa-desa yang menggunakannya.

Fase selanjutnya, SID mendukung **mekanisme komunikasi dan informasi 2 arah**. Pemerintahan desa akan memperoleh masukan, umpan balik, serta respon dari masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan bagi masyarakat, melalui SID masyarakat akan mendapatkan ruang untuk terlibat aktif dalam proses pemantauan dan evaluasi pembangunan. Target sistem pada fase ini adalah pengembangan *sms gateway*.

Fase ideal dalam siklus perkembangan SID adalah **sinergi antar sistem**. Pada fase ini SID telah mampu mengintegrasikan database di tingkat daerah dan nasional dan menjadi sistem informasi dan komunikasi mulai tingkat desa sampai nasional. Pada fase ini juga telah muncul bermacam **smart card** dengan penggunaan **barcode** yang dimiliki oleh warga secara individu sebagai bentuk kartu layanan publik untuk menikmati semua fasilitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Semakin tinggi fase perkembangan SID, semakin luas dan semakin banyak pula pemangku kepentingan yang merasakan manfaatnya. Semakin lengkap prasyarat pengembangan SID yang ada, semakin terbuka peluang untuk pemanfaatan SID secara lebih baik.

Bagan 4 : Pemanfaatan Sistem Informasi Desa



# MENINGKATKAN MANFAAT DATA; PENGALAMAN DARI DESA TERONG DAN NGLEGI

## **3.1. SID di Desa Terong**

Pemilihan lokasi penelitian yakni di dua desa yang telah menerapkan SID, yaitu Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan Desa Nglegi, Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul, didasarkan pada pertimbangan sejumlah aspek alih-teknologi yang memiliki tingkat kematangan paling optimal.

### **3.1.1. Gambaran umum**

Desa Terong secara administratif merupakan satu dari enam desa yang berada di wilayah Kecamatan Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian antara 325 – 350 meter dari permukaan laut. Desa yang terletak sejauh 25 km dari ibukota Kabupaten Bantul ini memiliki luas wilayah 775, 8615.

Wilayah Desa Terong ini terbagi dalam sembilan pedukuhan yang terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil, yaitu Rukun Tetangga (RT). Tidak ada pembagian wilayah dalam tingkat Rukun Warga (RW) di Desa Terong. Terdapat sejumlah 40 RT di wilayah Desa Terong. Pembagian wilayah pedukuhan dan RT tersebut meliputi:

Tabel 6: Data Pedukuhan dan Jumlah RT Desa Terong

No	Pedukuhan	Jumlah RT
1.	Kebokuning	4
2.	Saradan	5
3.	Pancuran	6
4.	Rejosari	4
5.	Terong II	6
6.	Terong I	2
7.	Pencitrejo	5
8.	Sendangsari	4
9.	Ngenep	4
Jumlah Total RT		40

Walaupun berada di wilayah pelosok perbukitan, tetapi akses dari desa menuju pusat pemerintahan di kecamatan, kabupaten, dan provinsi tidak terkendala dengan kondisi jalan aspal yang cukup baik. Setelah dibukanya akses jalan Cinomati, jarak menuju pusat pemerintahan kabupaten dan provinsi menjadi lebih dekat, dari 32 km menjadi 25 km.

Penduduk Desa Terong berdasarkan data desa pada bulan Februari 2010, berjumlah 6.484 orang dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1605 KK. Sebagaimana desa-desa lainnya, Desa Terong memiliki RPJMDes, dimana dalam RPJMDes tersebut tercantum visi dan misi Desa Terong, yaitu:

**Visi:** Desa Terong Tuntas, Sejahtera, Transparan dan Maju Tahun 2011

**Misi:**

1. Menuntaskan buta aksara
2. Menuntaskan wajib belajar 9 Tahun
3. Menuntaskan Empat masalah kesehatan
4. Sejahterakan warga dengan potensi lokal
5. Sejahterakan warga dengan pemberdayaan

6. Membuka lebih luas lagi transparansi pengelolaan pemerintahan desa menuju era keterbukaan publik
7. Maju dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi

### **3.1.2. Membangun Mimpi**

*“Berawal dari keinginan agar kantor pemerintahan desa bisa seperti swalayan, bisa menyediakan berbagai macam barang kebutuhan masyarakat, mau cari barang bisa gampang, sudah ada harga yang tertera dan tersusun dengan rapi, serta pembeli bisa memilih sendiri barang apa yang mereka butuhkan”*  
(Joko S, Staff Pelayanan Pemdes Terong)

Pemerintah desa memang selama ini dikenal sebagai ujung tombak pelayanan publik, ada banyak urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa, terutama terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Penyerahan berbagai urusan tersebut sayangnya seringkali tidak dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas dan fasilitasi kepada pemerintah desa, agar mampu optimal dalam memberikan pelayanan publik.

Walhasil, tidak sedikit pemerintah desa yang memberikan pelayanan “seadanya” kepada masyarakat, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun anggaran.

Kegelisahan inilah yang melandasi Pemerintah Desa Terong berpikir kreatif dan inovatif untuk membuat suatu sistem yang bisa mempercepat proses pelayanan publik, sehingga pelayanan tidak lagi dilakukan secara tradisional dan tidak pasrah dengan keterbatasan sumber daya.

Hal ini tentunya sejalan pula dengan visi dan misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes, dan dirasa perlu untuk segera ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen pemerintah desa terhadap masyarakat dan pembangunan desa.

Setidaknya ada 2 alasan utama pemerintah desa ingin membuat sistem data dan informasi desa, antara lain:

1. Keinginan untuk mewujudkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa
2. Banyaknya data-data desa yang berserakan dan tidak terkumpul secara rapi di arsip pemerintahan desa

SID di Desa Terong memang tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses yang cukup panjang, dari diskusi ke diskusi, hingga sampai pada aksi. Kehadiran COMBINE di Desa Terong memang dinilai pemerintah desa sebagai sebuah momen yang tepat, dimana sebelumnya COMBINE sudah masuk terlebih dahulu dengan program radio komunitas, sehingga pemerintah desa menilai COMBINE mampu dijadikan sebagai mitra dalam mewujudkan mimpi desa tersebut.

Dalam kurun waktu 2009-2010, diskusi dan penyusunan rencana kerja terus dilakukan oleh kedua belah pihak, dan memang diakui oleh pemerintah desa maupun COMBINE bahwa membuat desain SID memang bukan pekerjaan mudah. SID bukan sekedar membuat *software* yang bersifat teknis saja, melainkan banyak hal-hal substansi lainnya yang harus dipelajari oleh tim pengelola program, misalnya, harus mempelajari berbagai regulasi yang terkait dengan desa dan kewenangannya, sehingga bisa menterjemahkannya ke dalam suatu sistem yang tepat. Pemerintah desa pun harus bekerja keras untuk sebuah ide besar ini, dari membuat list pelayanan apa saja yang *compatible* digunakan dalam sistem ini. Rangkaian diskusi pun terus dilakukan, tidak hanya antara COMBINE dengan Pemerintah Desa Terong melainkan dengan desa-desa lainnya yang memiliki cita-cita yang sama.

Di tingkat desa, pemerintah desa pun mulai menyusun program kerja yang dimulai dengan proses sosialisasi serta penugasan kepada perangkat maupun struktur yang ada di bawah pemerintahan desa untuk melakukan pendataan.

### 3.1.3. Tahapan

#### a. Sosialisasi

Proses sosialisasi tentang SID dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengumpulkan seluruh perangkat desa termasuk 40 ketua RT yang ada di Desa Terong. Tidak banyak penjelasan tentang SID yang diinformasikan kepada para kepala dusun maupun ketua-ketua RT, hanya sekedar menginformasikan bahwa Desa Terong berencana akan membangun sistem informasi desa yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik pemerintah desa, dan untuk itu dibutuhkan data-data yang akurat. Terkait dengan kebutuhan data tersebut, maka kepala desa memerintahkan seluruh ketua RT untuk melakukan pendataan terhadap warganya secara komprehensif. Disini Ketua RT yang bertugas selaku *enumerator* dalam proses pendataan.

Saat itu pemerintah desa menginformasikan bahwa lembaran pengisian yang digunakan untuk proses pendataan adalah lembaran pengisian Profil Desa, mengingat kebutuhan data yang ada di lembaran pengisian tersebut dinilai sudah sangat lengkap, terutama Data Dasar Keluarga (DDK) serta kepemilikan aset.

Tidak ada proses diskusi panjang dalam kegiatan sosialisasi tersebut, semua instruksi dari Kepala Desa dan panduan dari perangkat desa diterima para kepala dusun dan ketua RT. Kepala Desa juga menekankan kepada para ketua RT dan kepala dusun agar proses pendataan ini bisa dilakukan dengan cepat dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 minggu mengingat adanya kebutuhan untuk segera menyelesaikan Program SID dalam rangka dijadikan sebagai program unggulan desa dalam Lomba Desa di tingkat Kabupaten Bantul.

Sosialisasi tentang SID dilakukan tidak hanya melalui pertemuan Pemerintah Desa dengan Ketua RT, melainkan dilakukan juga dengan menggunakan media Radio Komunitas "Menara Siar". Harapannya masyarakat luas juga mengetahui tentang rencana pemerintah desa tersebut. Di sisi yang lain Pemerintah Desa juga

mengakui bahwa proses sosialisasi ini tidak dilakukan secara masif, karena Program SID baru menjadi kebutuhan Pemerintahan Desa. Hal ini pada gilirannya nanti akan diinformasikan secara lebih luas kepada masyarakat.

## **b. Pendataan**

Seluruh RT (40) yang ada di wilayah Desa Terong pun bergerak cepat dalam rangka memenuhi kebutuhan data pemerintah desa. Kegiatan pendataan dilakukan dari rumah ke rumah, namun ada pula yang memanfaatkan forum warga sebagai media untuk melakukan pendataan.

Proses pendataan dari rumah ke rumah tidak hanya dilakukan oleh Ketua RT saja, melainkan di tingkat desa disiapkan 1 orang pendamping yang berasal dari karang taruna. Proses pendataan dari rumah ke rumah ini dinilai efektif mengingat ketika berada di rumah, biasanya pendata akan bertemu langsung dengan kepala keluarga dan didampingi oleh pasangannya, sehingga data yang diperoleh dinilai lebih akurat serta kepala keluarga bisa menunjukkan kartu keluarga untuk membantu mempercepat proses pendataan.

Beberapa kendala yang dihadapi pada saat melakukan pendataan, antara lain:

1. Masih belum cukup terbukanya penduduk dalam menyampaikan data, terutama terkait dengan kepemilikan aset
2. Adanya kesulitan untuk menemui warga
3. Pengetahuan *enumerator* yang terbatas berdampak pada masih adanya data yang tidak tergalai pada proses pendataan dikarenakan *probing* yang tidak dilakukan secara mendalam, sehingga dikeluhkan tentang masih adanya data-data yang dinilai tidak valid

Proses pendataan memang memakan waktu yang tidak sedikit, untuk 1 kepala keluarga saja dibutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk melakukan pendataan, dan satu RT kira-kira terdapat sekitar 30-40 KK.

Terkait dengan pendataan, form yang diberikan oleh pemerintah desa memang masih dinilai belum sempurna terutama terkait dengan data tanah dan golongannya, seperti: kepemilikan tanah perkarangan, sawah, tegalan, serta nomor C, persil, kelas tanah, luas dan jenis tanah. Padahal data tanah ini dinilai penting untuk kebutuhan pengajuan kredit ke Bank, pengajuan sertifikat maupun untuk ijin penebangan pohon.

### **c. Input data**

Kegiatan input data dilakukan oleh kelompok pemuda yang tergabung dalam karang taruna, dengan jumlah personil sebanyak 6 orang.

Kendala dalam proses input data:

1. Kendala teknis, misalnya terkait dengan jumlah komputer yang terbatas maupun komputer yang sering *hang*;
2. Tidak lengkapnya data seringkali memperlambat proses input, karena petugas harus terlebih dahulu mengklarifikasi kepada *enumerator*.
3. Pekerjaan harus dilakukan di kantor desa, tidak bisa dilakukan di rumah karena menggunakan sistem *link*.

### **d. Implementasi SID**

Keberadaan SID memang memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemerintah desa, mengingat dengan adanya sistem ini, desa memiliki data dan informasi yang lengkap dan dengan menggunakan sistem komputerisasi, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun menjadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya.

*"Kalau dulu untuk mencari data penduduk menurut kelompok umur saja kesulitan karena tidak mempunyai databasednya. Dengan adanya SID menjadi lebih mudah".*  
(Nuryanto, Kabag Pelayanan Pemdes Terong)

SID memudahkan kepada siapa saja perangkat desa untuk bisa memberikan pelayanan, sehingga tidak ada lagi kendala yang

biasa ditemui masyarakat seperti petugas pemberi layanan sedang tidak di tempat. Dengan sistem ini, siapa saja bisa memberikan pelayanan dengan catatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Apabila dulu data dan informasi desa masih bersifat manual, kecenderungan yang terjadi hanya segelintir orang saja yang bisa memberikan pelayanan, karena hanya petugasnya yang mengetahui keberadaan data serta mengetahui cara mengisi form, tetapi dengan SID, hanya dengan mengetik nama atau nomor register penduduk, maka secara otomatis form akan terisi dengan lengkap, dan tinggal sekali tekan pada kolom "print" maka surat yang dibutuhkan masyarakat pun sudah tercetak.

*"Kekarang itu gampang mas, tidak perlu repot-repot membuka dokumen tebal untuk mencari data, tinggal tulis di komputer dan tekan enter, maka data yang dibutuhkan akan keluar"*  
(Joko S, Staff Pelayanan Pemdes Terong)

*"Saya beberapa waktu lalu mengurus KTP anak dan istri saya, memang sekarang pelayanannya lebih cepat, hanya 2 menit sudah selesai, kalau dulu sekitar 15 menit. Yang lama justru di kecamatan, butuh waktu 45 menit, itu pun kalau tidak antri"*  
(Ribut, Kepala Dusun Terong I)

*"Saya menunggu sekitar 5 menit untuk mengurus KTP di kelurahan, sedang di kecamatan saya menunggu sampai 2 jam karena antri"*  
(Nisa, Penduduk Desa Terong)

Salah satu tujuan utama dari SID yang menjadi harapan pemerintah desa selama ini yaitu memperbaiki kualitas pelayanan publik yang bisa diukur dengan adanya kepastian dan kecepatan layanan. Sebelum adanya SID, diakui oleh Bapak Joko, S. selaku petugas pemberi layanan, bahwa masyarakat akan menunggu paling cepat 15 menit hingga surat selesai dibuat oleh petugas, namun sekarang setelah menggunakan SID, masyarakat cukup duduk sekitar 2 menit, dan surat yang dibutuhkan pun selesai sepanjang kebutuhan surat tersebut sudah tersedia formnya di dalam sistem yang ada.

Dari 30 jenis layanan yang menjadi tugas pemerintah desa, yang bisa diselesaikan dengan menggunakan SID baru ada 4 jenis layanan, sedangkan 26 layanan lainnya terpaksa masih dilakukan secara manual mengingat formnya belum masuk ke dalam sistem. Akan tetapi sedikit lebih mudah juga mengingat keseluruhan data sudah tersedia di dalam komputer, sehingga tidak perlu lagi mencari-cari berkas dalam dokumen-dokumen *hardcopy*.

Kapasitas pemerintah desa memang masih sangat terbatas untuk bisa membuat *software* atau program, sehingga Pemerintah Desa selama ini hanya berperan sebagai *user* saja. Apabila ada masalah terkait dengan SID, pihak Pemerintah Desa akan mengadukannya ke pihak CRI, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Desa kepada CRI memang terbilang masih sangat besar.

Pengalaman pelaksanaan SID di Desa Terong, setidaknya ada 2 alasan yang selama ini menyebabkan warga malas mengurus administrasi kependudukannya secara langsung, antara lain:

1. Alasan kesibukan dan keterbatasan waktu
2. Ketidaktahuan prosedur pelayanan

Hal ini juga diakui oleh Sudirman Alfian selaku Kepala Desa Terong, dimana tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak warganya yang selama ini lebih suka “nitip” urusan kependudukan kepada kepala dusun atau petugas yang memang menyediakan layanan, ketimbang mengurus sendiri dengan alasan di atas. Oleh karena itu, ia menyebutkan bahwa untuk mengatasi masalah itu, maka diperlukan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik, termasuk dengan menginisiasi adanya SID yang bisa membantu pemerintah desa dalam melayani masyarakat.

*“Saya ingin agar warga saya bisa lebih dekat dengan pemerintah desa, salah satu upaya saya untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah desa adalah menghimbau kepada warga melalui Kepala Dusun dan Ketua RT agar mengurus sendiri kebutuhan administrasi kependudukannya secara langsung”*  
(Sudirman Alfian, Kepala Desa Terong)

## **3.2. SID di Desa Nglegi**

### **3.2.1. Gambaran Umum**

Nglegi merupakan desa yang secara administratif menjadi bagian dari Kecamatan Patuk. Desa ini tergolong sebagai desa miskin dan tertinggal di Kabupaten Gunungkidul. Nglegi terletak di pinggiran Patuk atau sebelah timur kecamatan Patuk. Desa Nglegi terdiri atas 9 dusun. 5 dusun di antaranya terletak dibawah, dalam artian untuk mencapai dusun-dusun yang ada di bawah ini jalanan yang dilewati relatif datar dan tidak menanjak ekstrim. Akan tetapi berlainan dengan 5 dusun yang ada di bawah tersebut, ada 4 dusun yang masuk dalam wilayah desa Nglegi yang ada di atas atau disebut dengan dusun-dusun atas. Untuk mencapai dusun-dusun atas ini jalanan yang dilewati adalah jalanan menanjak. Jalanan terus terusan menanjak dan entah mengapa tidak dibangun jalan dengan sistem melingkari bukit yang membuat jalan lebih mudah untuk dilalui. Semakin naik jarak antar rumah semakin jauh dan bangunan rumah juga semakin sederhana. Rumah model limasan yang dindingnya sudah dibuat dari batako dan rumah-rumah yang masih terbuat dari kayu.

Dusun yang terletak dibawah itu diantaranya adalah dusun Klepu, dusun Trukan, dusun Nglampar, dusun Kembang, dan dusun Nglegi. Sedangkan dengan dusun atas urutan dari bawah sampai dengan dusun paling atas adalah dusun Gedora, dusun Padangan, dusun Glagah, dan dusun Karang.

Kondisi irigasi di Nglegi memburuk pasca gempa bumi pada 27 Mei 2006. Banyak sumber air menghilang. Talut-talut yang dibangun dengan stimulan semen dari beberapa tahun anggaran ADD dan bantuan dari Sobermas atau sekarang dikenal dengan nama BPMPKB tak banyak berfungsi.

Penduduk Desa Nglegi berjumlah 3.201, dimana 1.618 diantaranya adalah perempuan dan laki-laki berjumlah 1.583. Jumlah KK Desa Nglegi adalah 778 KK. Masyarakat Nglegi mayoritas adalah petani yang jumlahnya 1.192 orang, dimana mereka hidup dari

mengolah tanah dengan mengandalkan air hujan. Selain petani yang memiliki sawah, ada juga buruh tani yang berjumlah sekitar 160 orang. Dalam profil desa juga disebutkan ada 7 buruh migrant yang kesemuanya adalah perempuan, 12 orang laki-laki dan 9 orang perempuan sebagai PNS, 4 orang perempuan adalah pedagang keliling, 68 orang laki-laki memelihara ternak, 86 orang perempuan adalah Pekerja Rumah Tangga, 1 orang TNI, 7 orang Polri dimana salah satunya adalah perempuan, 34 orang pensiunan, dan karyawan swasta sebanyak 57 laki-laki dan 40 perempuan.

### **3.2.2. Inisiasi dan Tahapan Program SID**

#### **a. Perencanaan dan Sosialisasi**

Keberadaan IDEA sebagai LSM yang berperan dalam upaya mendorong partisipasi warga terkait dengan isu perencanaan dan penganggaran desa memang sedikit banyak membawa perubahan pada kehidupan berdemokrasi di desa ini.

Diakui oleh Pak Aripin selaku Kepala Desa Nglegi bahwa tingkat partisipasi warganya selama ini memang tergolong lemah, dan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut adalah kondisi geografis serta tingkat pendidikan yang masih rendah

IDEA mengawali proses pelaksanaan Program SID ini dengan menginisiasi terbentuknya tim yang berjumlah 10 orang, dimana 9 diantaranya merupakan perwakilan dari masing-masing dusun yang ada di Desa Nglegi, dan seorang koordinator yang dipimpin langsung oleh kepala desa.

Tim ini bekerja dalam beberapa tahapan, yaitu penyusunan instrumen, sosialisasi program, serta pendataan. Di awal program, IDEA membuat kebijakan training bagi Tim 10 yang dilaksanakan selama 3 hari, dimana agar lebih fokus, training tersebut dilaksanakan di lokasi yang jauh dari desa, dengan harapan peserta training bisa lebih fokus.

Materi *training* yang diselenggarakan oleh IDEA adalah: *Pertama*, pengenalan tentang SID, dimana pada materi ini Tim IDEA memperkenalkan tentang SID secara lebih mendalam, baik dari sisi teknis maupun substansi. Salah satu sub bagian dari materi ini adalah sosialisasi pelaksanaan dan manfaat SID yang sudah dilaksanakan di Desa Terong oleh Kepala Desa Terong. *Kedua*, penyusunan instrumen pendataan. Materi ini memakan waktu yang cukup lama, mengingat tidak gampangya merumuskan data apa saja yang dibutuhkan terkait dengan DDK dan Data Aset yang sekaligus digunakan juga sebagai indikator dalam merumuskan kategori keluarga miskin. *Ketiga*, teknik pengambilan data. Pada materi ini, peserta diberikan pengetahuan tentang teknik-teknik pengumpulan data partisipatif.

Pengetahuan Tim 10 tentang SID memang terbilang cukup lengkap, dan tim ini juga sudah memahami gambaran akan manfaat SID apabila program ini nantinya ada dan sudah diaplikasikan di desa mereka, hal ini menjadi penting sebagai modal awal tim bekerja.

## **b. Pendataan**

Diakui oleh Tim 10 ini bahwa bekerja mencari data memang bukan pekerjaan mudah, terlebih-lebih metode yang digunakan haruslah partisipatif dengan memanfaatkan forum-forum yang ada di masyarakat, seperti Dasa Wisma, Pertemuan RT, PKK dan forum-forum lainnya yang ada di tingkat dusun.

*“kalau si A misalnya mengaku hanya punya kambing 3 ekor, tetangganya terus akan bilang kalau dia sebenarnya mempunyai kambing 5 ekor. Jadi kalau partisipatif, tidak mungkin akan bohong karena kan tetangganya bisa mengingatkan”*  
(Sari, salah satu anggota Tim 10 dari Dusun Padangan)

Pilihan metode pendataan di Desa Nglegi memang tidak dilakukan *door to door* seperti yang terjadi di Desa Terong, hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya manipulasi kepemilikan aset suatu rumah tangga. Pilihan model partisipatif dinilai lebih valid,

dimana proses pendataan akan dilakukan bersama-sama oleh suatu kelompok, sehingga tetangga akan bisa menjadi kontrol.

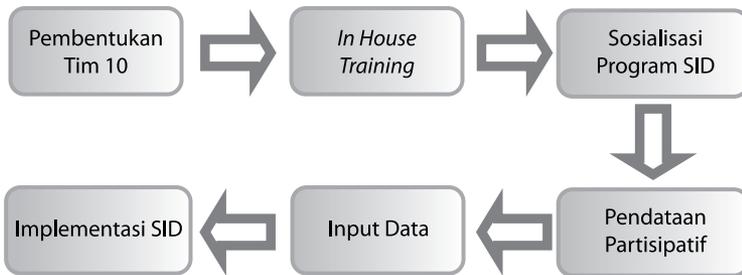
Proses pendataan yang demikian memang pada akhirnya tidak cukup gampang dilaksanakan, mengingat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih panjang, karena terjadi proses dialog bukan hanya antara petugas pencari data dengan informan, tetapi juga dengan lingkungan di sekitarnya.

Selain data aset, data dasar keluarga juga menjadi bagian yang harus dikumpulkan oleh tim ini. Akan tetapi untuk DDK sendiri, Tim 10 rata-rata menyebutkan tidak ada masalah terkait dengan pendataan ini, mengingat keberadaan Kartu Keluarga dinilai cukup membantu dalam proses pendataan warga.

Kegiatan input data memang bukan bagian dari kerja Tim 10, untuk proses ini, ditunjuk tim khusus yang berjumlah 6 orang, yang terdiri dari penduduk desa dan aparat pemerintah desa yang dinilai memiliki keterampilan teknis di bidang komputer.

Sebagian mereka berprofesi sebagai guru dan ada juga guru yang memang khusus mengajar tentang IT, seperti Pak Suroyo Metode partisipatif menjadi pilihan dalam pengembangan program ini di Desa Nglegi dampingan IDEA, disamping itu, rute pelaksanaan program pun sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh CRI. Secara umum *roadmap* program SID bisa terlihat dari bagan dibawah:

Bagan 5: Alur Pelaksanaan Program SID oleh IDEA



*Pembentukan tim 10* dilakukan dari hasil rembukan dengan pemerintah desa dan beberapa stakeholders desa. Tim yang terdiri dari 10 orang ini, 9 diantaranya adalah perwakilan dari tiap-tiap dusun dan dipimpin oleh seorang koordinator yaitu Kepala Desa.

*In house training* diadakan dalam rangka merumuskan program kerja, membuat instrumen atau alat kerja dan menetapkan metode yang tepat untuk melaksanakan pendataan.

*Sosialisasi program SID* dilakukan secara lebih luas kepada masyarakat dengan maksud agar program ini mendapat dukungan dari seluruh warga dan agar warga mengetahui secara utuh tentang program SID.

*Pendataan partisipatif* dilakukan oleh Tim 10 dengan memanfaatkan media-media pertemuan warga yang ada di masing-masing dusun.

*Input Data* dilakukan oleh tim entry yang memang ditunjuk langsung oleh kepala desa dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup dibidang komputer

*Implementasi SID* menjadi bagian dari perjalanan program ini, namun hingga dilakukannya studi tentang SID ini belum dilakukan secara optimal mengingat proses yang ada baru masuk pada tahapan Input Data.

Sebagai sebuah catatan, program yang dilakukan oleh IDEA dengan metode partisipatif ini memang memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan, seperti: warga merasa memiliki program dan memiliki banyak pengetahuan tentang SID. Akan tetapi disisi lain, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini terhitung lebih panjang bila dibandingkan model struktural sebagaimana yang ditempuh oleh CRI dengan mengambil sampel Desa Terong.

### 3.2.3. Tantangan SID

Kapasitas sumber daya manusia di desa memang dirasakan cukup menjadi hambatan, dimana tingkat pendidikan yang masih rendah dan keterampilan teknis yang terbatas, seringkali menjadi kendala dalam mengembangkan SID.

Di desa tidak banyak warga yang memahami tentang sistem informasi dan teknologi, dan kadang hanya terbatas pada mampu mengoperasikan komputer saja, sehingga perannya pun terbatas pada input dan olah data saja, tidak sampai pada memahami dan mengembangkan sistem, sehingga tingkat ketergantungan kepada *provider* penyedia sistem masih sangat tinggi.

Selain sumber daya manusia, kendala lainnya adalah sumber daya anggaran. Bekerja secara sukarela memang hal yang lumrah terjadi di desa, namun alangkah baiknya apabila pemerintah desa atau pihak penyelenggaraan program bisa mengalokasikan anggaran meskipun tidak besar kepada pelaksana program di lapangan. Setidaknya inilah keluhan dan sekaligus harapan yang muncul dari seluruh anggota Tim 10 di Desa Nglegi. Kendala lainnya adalah tidak seluruh perangkat desa memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

Faktor kebijakan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan SID. Di tingkat desa sebenarnya kebutuhan akan kebijakan tidak begitu menjadi hal yang utama. Peraturan desa berupa Surat Keputusan Kepala Desa sudah cukup untuk implementasi SID. Kebijakan Pemda tentang SID dibutuhkan manakala sistem ini akan direplikasi oleh desa-desa lain, sehingga membentuk jaringan SID yang lebih luas. Kebijakan Pemda sangat dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan pada kesediaan memanfaatkan sistem ini dan legitimasi pada data-data yang ada di dalam SID. Pada wilayah-wilayah inilah dibutuhkan kemauan politik dari Pemda untuk mendukung sistem ini. Dengan kata lain kebijakan pemda yang mendukung SID, akan membuka peluang lebih luas, karena desa-desa lain lebih mudah dalam implementasinya.

*SID itu seperti teknologi tepat guna. Kalau dulu orang membajak sawah dengan kerbau, sekarang sudah menggunakan traktor, kalau dulu memanen padi masih manual, sekarang sudah menggunakan mesin. Outputnya sama, maka menurut saya, SID adalah kedaulatan desa dalam mengelola informasi.*  
(Sudirman Alfian, Kepala Desa Terong)

Secara umum data yang ditampilkan dalam SID sudah cukup memadai. SID sudah mampu mempermudah dan mempercepat proses-proses pelayanan publik di tingkat desa. Temuan di 2 desa yang sudah mengembangkan SID (Terong dan Nglegi) menunjukkan bahwa SID yang sudah ada sekarang sangat bermanfaat bagi pemerintah desa. Dengan adanya SID semakin memperlancar perencanaan pembangunan yang partisipatif dan perbaikan pelayanan publik.

Pada sisi yang lain, jika SID akan dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas, maka terdapat beberapa catatan antara lain;

- Aspek pengintegrasian bukanlah persoalan sederhana, karena data yang dimiliki SKPD di kabupaten sering kali berbeda dan dibangun dengan aplikasi yang berbeda pula sehingga tidak kompatibel untuk 'dialogkan', akibatnya jika dilakukan penambahan fitur/item akan cukup rumit.
- Aspek isi data, penting untuk diperhatikan adalah akurasi data. Jika melihat data-data yang selama ini disajikan oleh pemda terlihat bahwa masih diragukan kevalidannya. Masyarakat sebagai sumber informasi, seringkali tidak mau jujur ketika dimintai data.

### **3.3. Memaknai Sid Sebagai Jawaban Atas Persoalan**

Seperti yang telah disampaikan di atas, salah satu bentuk kewenangan desa adalah kewenangan yang bersifat *distributive*, dimana pemerintah kabupaten/kota menyerahkan beberapa urusan kepada desa, misalnya terkait dengan pendataan, perijinan dan pencatatan sipil.

Selama ini, urusan-urusan tersebut dijalankan oleh pemerintah desa dengan standar pelayanan yang masih minimal, sekedar

menggugurkan kewajiban tanpa memaknai secara dalam arti penting dari data-data yang tersedia.

Profil desa diakui memang memiliki kekayaan data yang luar biasa, namun sayangnya data ini cenderung belum banyak manfaatnya bagi pemerintah desa, mengingat data yang ada belum bisa diolah/dimanfaatkan secara maksimal dan tidak saling terhubung antar data.

Berangkat dari ketidak mampuan Profil Desa menjawab kebutuhan Pemerintah Desa dan masyarakatnya, muncullah SID sebagai salah satu alternative jawaban atas persoalan yang dihadapi pemerintah desa kaitannya dengan profil desa.

SID sebenarnya merupakan penyempurnaan dari ide profil desa, dimana profil desa dinilai masih belum banyak menjawab kebutuhan desa akan ketersediaan data maupun pemanfaatan data untuk pelayanan publik.

Desain profil desa mengacu pada data umum yang mengacu pada karakteristik umum desa Indonesia. Profil desa tidak mempertimbangkan keanekaragaman desa dalam mengelola data yang dibutuhkan. Ada sifat unik dari sebuah desa kalau dibandingkan dengan desa lainnya yang tidak bisa direspon oleh sekedar dari profil desa. Inilah peluang bagi sistem informasi desa untuk menanggulangi masalah tersebut.

Profil desa berawal dari identifikasi persoalan tentang data dan informasi suatu desa yang tidak bisa dilepaskan dari Profil Desa yang ada. Sejalan dengan itu, sebenarnya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa mencoba melakukan penataan terhadap desa, baik dari sisi kewenangan, pejabat/perangkat Pemerintah Desa dan BPD, kelembagaan desa, hingga perencanaan dan keuangan desa. Disebutkan dalam Pasal 65, bahwa perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana salah satu bentuknya adalah profil desa.

Profil desa sudah diatur tersendiri dalam Permendagri No. 12 Tahun 2007, dimana komposisi profil desa sebagaimana diatur dalam regulasi ini terdiri dari data dasar keluarga, potensi desa dan tingkat perkembangan desa.

Profil desa sebagaimana diulas sebelumnya memang memiliki kekayaan data yang luar biasa, namun sayangnya data ini cenderung menjadi tidak banyak manfaatnya bagi pemerintah desa, mengingat data tidak bisa diolah/dimanfaatkan secara maksimal dan tidak saling terhubung antar data. Data masih dalam bentuk data tunggal belum mengalami agregasi dan diolah dalam bentuk data sekunder untuk dilihat deskripsi datanya dalam bentuk tren atau komposisi.

Diakui oleh pemerintah desa bahwa bukan pekerjaan mudah membuat profil desa, berbagai masalah yang terkait dengan profil desa yang ditemukan, antara lain:

1. Banyaknya data yang harus digali dan diinput ke dalam profil desa, dan untuk ini membutuhkan sumber daya yang cukup termasuk keuangan desa;
2. Data tidak bisa dimanfaatkan secara optimal serta *software* yang ada tidak mendukung untuk memanggil data secara cepat;
3. Profil Desa tidak bisa digunakan untuk pelayanan publik di tingkat desa;
4. Data dalam Profil Desa tidak saling terhubung satu sama lain;
5. Tidak ada pendampingan dari pemerintah desa dalam pembuatan profil desa;

### **3.4. Pengembangan SID**

Untuk menggali aspek tertentu dalam sistem informasi desa maka penggalian melalui pakar adalah sebuah kebutuhan. Pengayaan melalui review memang menjadi cara untuk memperkaya perspektif dalam menelaah sistem ini. Dalam review pakar banyak hal yang telah ditelaah baik mengenai konseptualisasi maupun abstraksi dari sistem informasi desa.

Review pakar diadakan untuk menghasilkan beberapa catatan penting bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terkait evaluasi pelaksanaan SID. Berbagi masukan akan menjadi bahan pembelajaran bersama sekaligus sebagai dasar perbaikan kualitas layanan kepada pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu hasil rekomendasi review pakar juga akan digunakan sebagai dasar pengembangan SID bagi pemda/pemdes yang akan mereplikasi sistem ini.

Review Pakar merekomendasikan 4 strategi membangun SID dalam upaya pengembangannya yang lebih luas.

1. Strategi Fasilitasi  
Peran lembaga pendamping adalah memfasilitasi sekaligus mengkombinasikan antara orang luar dan Pemerintah desa. Fasilitasi mempunyai peran dalam melakukan elaborasi pada penyempurnaan dan pen-  
definisan sistem informasi yang desa yang mampu menjawab permasalahan masyarakat desa.
2. Strategi Emansipasi  
Mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat di desa tersebut. Emansipasi merupakan sebuah peningkatan kesadaran dalam memahami sistem informasi desa. Dengan adanya peningkatan kesadaran maka utilitas SID menjadi sesuatu yang harus menjadi sorotan dalam upaya realisasi SID terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Strategi Pengakuan  
SID harus diakui dan mendapat legitimasi baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat. Pada tingkat tertentu karena peran pentingnya SID, akhirnya sistem ini mendapat nilai yang diakui oleh unsur pemerintahan daerah karena kemanfaatannya dan kemampuannya mendorong hasil-hasil pembangunan menjadi lebih berkualitas.
4. Strategi Intervensi  
Pemerintah Daerah melakukan intervensi dengan mengeluarkan regulasi tentang SID untuk menjadi dasar kebijakan dalam pengembangan SID, di sisi yang

lain Pemerintahan Desa juga membuktikan bahwa mereka juga membutuhkan sistem ini. Ini berupa proses akhir yang nantinya memperkuat peran SID dalam mengelola masalah-masalah masyarakat. Namun yang tetap perlu dikritisi SID hanya sekedar alat, sedangkan kepentingan bisa diisi baik oleh pemerintahan desa atau masyarakat. Kepentingan yang bergeser karena intervensi dari pemerintah adalah sesuatu yang harus diwaspadai.

Pada segmen review pakar banyak catatan penting mengenai ini, misalnya SID harus mampu menyajikan angka kemiskinan di level desa, selanjutnya angka-angka ini akan diintegrasikan dengan data yang dimiliki oleh pemda/instansi terkait. Data-data inilah yang akan menjadi rujukan dalam proses pembangunan di tingkat desa.

Data yang disajikan oleh SID haruslah sesuai dengan kebutuhan desa dan disajikan dengan tampilan yang lebih menarik dan selalu diperbaharui. Dalam proses selanjutnya SID dan Profil desa adalah dua hal yang saling melengkapi, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan sehingga data profil desa bisa dipakai sebagai data awal di dalam SID.

Akhirnya pengembangan SID lebih ditekankan kepada kepentingan ketersediaan data dan informasi tentang desa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut dengan adanya SID pengelolaan seluruh potensi desa bisa dilakukan dengan lebih mudah dan partisipatif. Hal-hal inilah yang akan mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas warga desa yang pada gilirannya akan memperkuat modal sosial yang ada di dalam masyarakat.

Pengembangan SID dalam lingkup yang lebih luas, tidak bisa semata-mata hanya mengambil inspirasi dari hasil studi dan review pakar saja. Pengembangan SID juga harus memperhitungkan beberapa variabel empiris yaitu kondisi terkini peta interaksi di sebuah ranah pemerintahan (politik, hukum, administratif dan

ekonomi). Oleh karena itu tawaran model pengembangan SID ini merupakan kombinasi dari pendekatan bottom up dan strategi regulasi Pemda yang bersifat *top down*.

Pembacaan tentang kontekstualisasi medan, afinitas, dan ragam praktek pemerintahan dari aspek sosial politik sangat menentukan keberlanjutan sebuah sistem informasi desa. Pergulatan di aspek sosial politik menjadi cara sistem informasi desa untuk mengelola lingkungannya agar tidak mengancam dirinya sendiri.

# MEMANTAPKAN SID, PERLUASAN PENGARUH DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN

Saat ini Sistem Informasi Desa menarik bagi banyak kalangan, baik mereka yang ingin menerapkan di desanya masing-masing, maupun para pihak yang terlibat memberikan dukungan kepada program pemberdayaan di desa. SID dianggap instrumen atau kelengkapan yang perlu ada untuk mendukung tercapainya *good governance*. SID yang merupakan bagian dari Teknologi informasi yang Tepat Guna dapat dilihat keberhasilannya perkembangannya jika terdapat pengelolaan dan kelembagaan yang dibentuk untuk memastikan keberlanjutannya<sup>1</sup>. Dalam kaitan ini perlu disimak apa yang dikemukakan Thorne (2007), teknologi baru yang memerlukan perubahan-perubahan perilaku dan/atau teknologi yang tidak sekedar berupa prototipe namun masih belum matang sifatnya, perlu sangat hati-hati diperkenalkan. Penerapan dan pemanfaatan SID dengan demikian dapat menggunakan pendekatan yang selama ini diterapkan dalam penerapan jenis teknologi tepat guna yang pernah ada di Indonesia. Dalam pada itu, dalam evaluasi yang disusun terhadap program “*Dukungan Strategi dan*

---

<sup>1</sup> Lihat Thorne, Steve (2007). *Towards a framework of clean energy technology receptivity*. Volume 36, Issue 8, August 2008, Pages 2831–2838. Artikel yang diunduh dari: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142150800116X>, diunduh pada Februari 6, 2012

*Konsep Bagi Program Desa Mandiri Energi*" (Program SCS - DME), GTZ (2009) melaporkan ada 3 (tiga) kelompok masalah yang dihadapi oleh Program DME. Masing - masing adalah permasalahan yang menyangkut persoalan transfer teknologi, masalah pelebagaan partisipasi masyarakat, dan masalah kelembagaan dan kebijakan Program DME itu sendiri. Dalam hal ini, permasalahan transfer teknologi dilihat sebagai inti permasalahan, sementara masalah pelebagaan partisipasi masyarakat dan masalah kelembagaan dan kebijakan adalah dua kelompok masalah yang diasumsikan dapat memperlancar atau bahkan menghambat proses - proses transfer teknologi dimaksud<sup>2</sup>. Bahasan yang akan dilakukan dalam bab ini akan merujuk pada temuan ataupun apa yang dikemukakan Thorne dan studi yang dilakukan GTZ dimaksud. Pada bab ini, SID akan coba diteropong dengan pendekatan alih teknologi yang paling sesuai, dari situ lebih jauh akan diterapkan aspek-aspek yang akan menentukan keberhasilan penerimaan SID sebagai teknologi.

#### **4.1 Aspek yang Berperan dalam Alih Teknologi**

Agar pengembangan SID dapat berkelanjutan dan dapat direplikasi ke tempat lain, maka keberhasilan dalam mentransfer teknologi amatlah penting. Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan untuk memastikan keberhasilan transfer teknologi, yaitu pendekatan model teknologi tepat guna (*appropriate technology*) dan penerimaan teknologi (*technology receptivity*).

##### **1. Teknologi Tepat Guna (*Appropriate Technology*)**

Teknologi Tepat Guna (TTG) biasanya diterapkan untuk menjelaskan teknologi sederhana yang dianggap cocok bagi negara-negara berkembang atau kawasan perdesaan. Adapun dalam pengertiannya terminologi Teknologi Tepat Guna merujuk pada

---

<sup>2</sup> Lihat: GTZ. "Evaluasi terhadap Program Desa Mandiri Energi: dari aspek transfer teknologi, Kelebagaan, dan Partisipasi Masyarakat". Publikasi oleh Dukungan Strategis dan Konseptual Terhadap Program Desa Mandiri Energi, bekerja sama dengan GTZ GmbH, Mei, 2009

teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan<sup>3</sup>. Sejauh mana teknologi tersebut dapat diterima oleh masyarakat desa dan dianggap matang bisa digunakan dalam mengukur TTG. Setidaknya kematangan teknologi tersebut memenuhi aspek teknis, seperti teknologi sederhana atau termasuk dalam skala kecil, dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat desa yang memiliki tingkat pemahaman teknis sangat terbatas dan dapat direplikasikan di tempat lain.

## 2. Penyerapan Teknologi (*technology receptivity*)

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan transfer teknologi adalah Penyerapan Teknologi (*technology receptivity*). Ada 3 (tiga) aspek yang menentukan keberhasilan penerimaan (*receptive*) teknologi, yang dikaitkan dengan keadaan masyarakat dan lingkungan. Masing-masing adalah perangkat teknologi (*hardware of technology*), seperti perangkat mesin, tapi juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses, yang disebut dengan perangkat lunak (*software*) dan pengorganisasian (*orgware*) dari teknologi. Selanjutnya pada bagian ini, SID sebagai teknologi informasi akan menggunakan ke tiga aspek tersebut sebagai kerangka teori yang disarankan dalam implementasinya.

### i) Perangkat Teknologi (*hardware of technology*)

SID sebagai Teknologi Informasi yang terikat dalam wahana sistem komputer hanya dapat dioperasikan di wilayah yang memiliki ketersediaan listrik dan elemen-elemen pendukung sistem itu sendiri, termasuk yang dikenal dengan *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak) dalam Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Kegagalan suatu teknologi untuk berfungsi secara optimal setelah dipasang sangat sering terjadi. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor, misal tidak dilakukannya

---

<sup>3</sup> Definisi teknologi tepat guna dapat dilihat di [http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi\\_tepat\\_guna](http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_tepat_guna)

asesmen yang memadai terhadap prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pengoperasian teknologi tersebut atau mungkin kapasitas yang tersedia di wilayah pemasangan. Pengalaman semacam ini dialami COMBINE saat melakukan pemasangan sejumlah radio komunitas di wilayah Aceh pasca bencana tsunami tahun 2005. Radio komunitas meski merupakan teknologi sederhana, membutuhkan kapasitas listrik yang stabil dan memadai. Saat itu perangkat keras yang didatangkan dari luar Aceh, tidak menyertakan alat penstabil tegangan listrik (*voltage stabilizer*). Akibatnya, dalam kondisi wilayah yang saat itu masih belum stabil ketersediaan listriknya, sejumlah peralatan yang dipasang mengalami kerusakan secara terus-menerus<sup>4</sup>. Alih teknologi pada beberapa kasus juga mengalami kegagalan ketika perangkat yang dipasang adalah teknologi *built up* (bermerk) yang diimpor dari luar negeri.

#### ii). **Software**

Salah satu penentu keberhasilan alih teknologi adalah ketersediaan *software* atau perangkat lunak. Adapun yang dimaksud dengan *software* disini bukan dalam pengertian perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan oleh TIK, namun merujuk pada kapasitas dan seluruh proses yang dilibatkan dalam menggunakan teknologi. Penjelasan terperinci tentang aspek *software* dapat dipelajari dari pendapat Promod B. Shresta yang dikutip oleh Thorne<sup>5</sup>, menurutnya *software* adalah

*“Production skills and experiences, the people-embodied form of technology, include all required abilities necessary for the transformation operation, such as expertise, proficiency, dexterity, creativity, diligence and ingenuity.”*

---

<sup>4</sup> Laporan Program Aceh Reconstruction Radio Network (ARRNet) 2006-2007, disusun oleh COMBINE Resource Institution sebagai pertanggungjawaban program yang dibiayai oleh *Japan Social Development Fund*.

<sup>5</sup> Thorne, Steve (2007) *Community Based Technology Solutions: Adapting to Climate Change*. Booklet yang dipublikasikan oleh South South North (SSN). Diunduh dari: <http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=9545>, tanggal 7 Februari, 2012

Sebagai wilayah yang pertama kali menginisiasi SID, hingga sekarang Desa Terong, Bantul menjadi sasaran bagi wilayah lain untuk mempelajari SID. Kegiatan berbagi pengetahuan ini, bisa dikatakan sebagai tahap awal dalam membangun aspek *software*. Peluang pertukaran pengetahuan akan sangat mungkin digali terus-menerus sepanjang proses penyerapan teknologi baru ini. Dalam hal ini kemitraan antara desa dengan lembaga pelaksana program SID harus dibuka lebih luas, sehingga pengetahuan dapat berkembang dari pihak-pihak lain, misal kelompok LSM yang sebelumnya telah memberikan fasilitasi dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, pertukaran pengetahuan yang terjadi juga bisa mencakup bagian dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan teknis.

Kegagalan dalam alih teknologi kerap terjadi karena tidak ada sistem dukungan dan bantuan (*helpdesk support*) terdekat dengan lokasi, manakala diperlukan perawatan yang bersifat rutin pada komputer maupun aplikasi sistem informasi yang digunakan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang perlu dicermati dalam penggunaan komputer dan aplikasinya, yakni:

### **1. Kebutuhan Penguasaan Aplikasi**

Menguasai aplikasi perangkat lunak komputer sebagai alat bantu, pengolahan data maupun alat bantu dalam menampilkan output diberikan pada masa alih teknologi SID dengan harapan akan mendukung proses pengelolaan SID yang akan dijalani. Pada proses awal itu berupa alih teknologi aplikasi untuk pengelola akan menanamkan kemampuan yang kuat untuk penguasaan aplikasi komputer yang diharapkan memberikan daya dukung kinerja ketika SID telah berjalan.

### **2. Kebutuhan Penguasaan Analisis Sistem**

SID yang telah diterapkan di beberapa lokasi sasaran juga mensyaratkan kemampuan analisis dan rancangan sistem informasi oleh pengelola. Kemampuan ini dalam beberapa kasus di desa merupakan bagian atau tahapan pengembangan sistem untuk memahami sistem informasi yang dibutuhkan di desa tersebut.

### 3. Kebutuhan dalam Merawat Komputer

Pada tahap awal alih teknologi, pengelola juga harus mampu melakukan perawatan yang dapat digunakan sehari-hari agar komputer selalu berjalan dengan baik. Panduan sederhana untuk memelihara agar komputer tetap beroperasi dengan baik dan data yang tersimpan di dalamnya terlindungi perlu diberikan sebagai bagian dari pemeliharaan rutin.

Selain mempersiapkan keberadaan SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan memproses pengolahan data-dengan tahap meng- input data, memproses dan menghasilkan keluaran (*output*)- pemasangan SID di suatu wilayah juga harus memperhitungkan keberadaan teknisi lokal dalam desain penerapannya.

Perangkat lunak SID yang dikembangkan dengan *platform* terbuka (*Open Source Software*) memberikan peluang adanya pengembangan dan modifikasi selanjutnya oleh berbagai pihak. Penggunaan *Open Source Software* memungkinkan hal tersebut untuk dilakukan asalkan tetap mengikuti prinsip *copyleft*. Artinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengembangkan aplikasi tersebut sepanjang ia juga memberikan hak pada orang yang berikutnya untuk melakukan pengembangan dengan jaminan pelampiran *source code*. Pengembangan teknologi SID dalam konteks semacam ini juga merupakan bagian dari intervensi pada aspek *software*. Untuk tetap menjaga kepentingan komunitas desa sebagai penerima manfaat SID di satu sisi, dan memberi ruang kreativitas untuk pengembangan SID di sisi lain, maka dibutuhkan dukungan institusional untuk membangun kerja kolaborasi dengan komunitas TIK yang formal maupun informal. Pada tahap ini, alih teknologi membutuhkan prasyarat kelembagaan dan kebijakan.

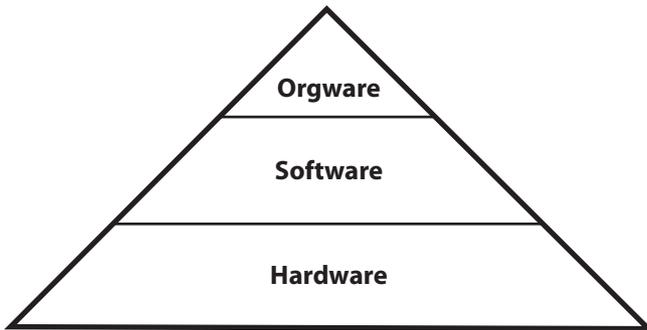
#### iii). **Orgware**

Jika SID ingin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara lebih luas, maka SID membutuhkan aspek lain untuk mendukung pelaksanaannya, yaitu *Orgware*. *Orgware* yang diharapkan adalah regulasi di tingkat kabupaten/propinsi/nasional yang

mengatur tentang pendayagunaan data dan informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID). Aspek ini juga semakin menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai penentu dalam keberhasilan penyerapan teknologi. Komponen ini merujuk pada suatu upaya mencapai kepemilikan (*ownership*) dan penata laksanaan kelembagaan dari suatu komunitas dimana teknologi akan digunakan. Beberapa upaya yang termasuk dalam bagian ini adalah pembentukan kerangka kerja kelembagaan, yang akan berperan diantaranya dalam melakukan sistematisasi pengoperasian teknologi, membangun jaringan kemitraan, atau komunitas dimana teknologi tersebut digunakan, mengelola dan memasarkan agar beban biaya yang diakibatkan oleh pengoperasian perangkat teknologi tersebut menjadi lebih ringan ditanggung oleh masyarakat. Thorne (2007) memperlihatkan melalui sejumlah kasus penerapan teknologi kepada rakyat miskin di Afrika Selatan bahwa keberadaan berbagai elemen yang termasuk dalam *orgware* ini akan menjamin keberlanjutan dalam proses alih-teknologi. Beberapa intervensi yang perlu diupayakan secara konsisten dan sistematis untuk membangun kelembagaan dan kebijakan pada program SID adalah:

- Melakukan diseminasi kepada publik tentang manfaat dan praktek dalam penerapan SID untuk mendorong adanya kebijakan yang dapat mengukuhkan keberlanjutan pemanfaatan SID di tingkat desa maupun supra desa.
- Membuat rancangan pendanaan, baik dengan memobilisasi dana swadaya masyarakat atau dana bantuan dari pemerintah/non pemerintah, untuk mengoptimalkan pemanfaatan SID
- Menjaring kemitraan dengan instansi pendidikan dan pihak-pihak yang dapat memfasilitasi pengetahuan dan ketrampilan dalam pengoperasian SID
- Mengembangkan *Standard Operational Procedure* (SOP) sebagai panduan alur, mekanisme dan penggunaan konten yang ada di SID

Bagan 6 : Piramida Aspek Penyerapan Teknologi



Beberapa aspek secara menonjol diperlihatkan dalam penerapan SID di desa Terong dan Nglegi yang memperlihatkan adanya peluang keberhasilan alih-teknologi, sebagaimana yang dapat dilihat di tabel di bawah ini:

1. kepeloporan oleh kepala desa di Terong (*software*)
2. Legalitas/regulasi (*software*)
3. Struktur kerja dalam pengelolaan SID (*orgware*)
4. Otorisasi dalam mengakses dan memanfaatkan konten dalam SID (*orgware*)
5. Keterampilan dan pengetahuan SDM utk troubleshooting, updating data (*software*)
6. Kelengkapan hardware (*orgware*)
7. Kesamaan visi di semua pihak yg terlibat dlm implementasi (*software*)
8. Fasilitasi pemanfaatan (*software*)
9. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan (*orgware*)

Apapun format SID yang akan dibangun di masa mendatang, kesemuanya itu harus mengarah pada satu tujuan utama yaitu upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini mencakup:

1. Pengembangan standarisasi pelayanan
2. Peningkatan efisiensi pelayanan
3. Pelayanan yang lebih terjangkau oleh semua pihak
4. Pembaharuan data sesuai kebutuhan masyarakat

Ada beberapa prinsip utama yang perlu menjadi rujukan. **Pertama**, SID harus didasarkan pada kepentingan bersama dari para pihak yang membutuhkan. Hal ini akan berimplikasi pada proses pembentukan SID yang bersifat partisipatif, melibatkan semua pihak secara setara yang pada gilirannya melahirkan komitmen. **Kedua**, karena jenis kepentingan para pihak tidak sepenuhnya sama, maka kejelasan transaksi dan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing pihak merupakan substansi komitmen yang harus ada. **Ketiga**, SID harus bersifat fleksibel sehingga peluang perubahan selalu terbuka. Namun demikian, fleksibilitas ini harus tetap mengedepankan kepatuhan kepada sistem informasi yang diakui oleh pemerintah dan asas keberlanjutan. Oleh karena itu format SID perlu dikembangkan secara bertahap sebagai bentuk daya tanggap terhadap dinamika kebutuhan. Sangat dimungkinkan konten SID yang berbeda walaupun formatnya sama karena desa-desa yang akan mereplikasi mempunyai karakteristik yang berbeda juga.

#### **4.2 Rencana Advokasi untuk Perluasan (*scaling-up*)**

Seperti yang sempat disinggung pada bab sebelumnya perencanaan pembangunan di tingkat desa masih menuai banyak persoalan dan kritik dari dalam maupun luar desa. Padahal Musrembang di tingkat desa adalah mekanisme formal yang sangat diharapkan dapat mewujudkan prinsip perencanaan yang berangkat dari aras bawah. Paling tidak ada 3 (tiga) persoalan utama yang dianggap merintang prinsip perencanaan *bottom up* melalui Musrembangdes, yakni:

1. **Partisipasi masyarakat masih lemah:** indikasi ini ditunjukkan oleh sejumlah penelitian yang mengungkapkan bahwa proses Musrembangdes hanya dimotori oleh elit-elit desa. Pada proses perencanaan pun masyarakat masih merasa tidak dilibatkan dalam penyelidikan masalah dan kebutuhan, hal ini diduga karena proses terlalu didominasi oleh perwakilan yang berasal dari aktor pemerintahan desa dan lembaga-lembaga formal desa.

2. **Pendekatan spasial:** Musrembangdes mengikuti alur perencanaan spasial, dari tingkat desa yang dibawa ke kecamatan dan dilanjutkan hingga kabupaten, dianggap tidak dapat menjangkau isu-isu yang sektoral (seperti layanan pendidikan dan kesehatan). Usulan yang diangkat oleh masyarakat desa akan terbatas pada lingkup administratif desa mereka saja.

3. **Distorsi antara perencanaan dengan realisasi:** distorsi tersebut terjadi karena tidak adanya sinkronisasi antara perencanaan yang diusulkan oleh masyarakat desa kepada tingkat supra desa. Kekecewaan tidak adanya respons yang sesuai dari tingkat supra desa kepada usulan yang dibuat dari desa menimbulkan apatisme warga desa terhadap proses perencanaan pembangunan desa. Kesenjangan antara realisasi dan rencana dari bawah ini diduga akibat dominannya proses politik di tingkat kabupaten.

Penyelenggaraan Musrembang merupakan implikasi yang disyaratkan kepada desa untuk menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan. RKPDes sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun setiap lima tahun diatur dalam PP No. 72/2005 untuk mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Sebagai salah satu sumber aliran dana yang masuk ke desa, selain Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), ADD menjadi penting sebagai sumber pendapatan Desa karena selama ini sumber-sumber pendapatan Desa lain praktis tidak dapat diandalkan. Sementara BLM, dengan sumber dana terbesar berasal dari PNPM Mandiri, adalah bagian dari agenda Penanggulangan Kemiskinan yang menggunakan model *community driven development*, dalam prosesnya mengandalkan struktur di luar pemerintahan desa. Terhadap model perencanaan anggaran yang diterapkan PNPM ini, Eko (2011) melemparkan kritik pedas, karena meskipun dalam prosesnya lebih melibatkan masyarakat, namun tidak ada dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan pembangunan desa. Malahan karena program ini membentuk kelembagaan sendiri yang tidak menyatu dengan pemerintahan dan masyarakat.

akat desa, ia melemahkan bahkan mematikan lembaga-lembaga yang ada<sup>6</sup>.

Oleh karena itu, pada bagian ini SID akan mengadopsi model *integrated planning* dalam konteks “desa membangun” sebagaimana yang ditawarkan Eko (2011)<sup>7</sup>. Model ini mensyaratkan perencanaan sebagai satu wadah dimana semua program dan uang masuk ke dalam rencana dan penganggaran desa menjadi relevan untuk diadvokasi.

#### **4.2.1 Aspek pelembagaan di tingkat desa**

Hasil dari penerapan program SID sejauh ini telah memberikan keyakinan bagi COMBINE untuk melanjutkan perluasan dan pengembangan program. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelembagaan program SID menjadi bagian yang akan kami advokasi. Berangkat dari pengalaman pengembangan SID yang ingin merevitalisasi sistem Profil desa dan kerangka teori alih teknologi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka ada 3 (tiga) tahap yang dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan proses pelembagaan, sebagai berikut ini:

1. Tahap Pembangunan Visi Bersama;
2. Tahap Peningkatan Kapasitas; dan
3. Tahap Kebijakan

Bagi COMBINE, kualitas keberhasilan dari setiap tahap tersebut akan ditentukan oleh keselarasan dari 3 (tiga) unsur yaitu insti-

---

<sup>6</sup> Eko, Sutoro (2011), “Membuat Desa Sebagai “Negara Kecil” yang Demokratis, Mandiri dan Sejahtera”. Working Paper Seri 2, Juli 2011. Paper ini diunduh dari <http://www.ireyogya.org/id/article/working-paper/membuat-desa-sebagai-negara-kecil-yang-demokratis-mandiri-dan-sejahtera.html;download=d77e68596c15c53c2a33ad143739902d#downloadFile>, pada tanggal 7 Februari

<sup>7</sup> Lihat juga gagasan yang “*Satu desa, satu rencana dan satu anggaran*” oleh Zakaria, Yando. R., (2011) dalam “Menggagas Arah Kebijakan/Regulasi tentang DESA yang ‘Menyembuhkan Indonesia’”. Materi presentasi yang disampaikan pada Simposium Konsolidasi Jaringan Advokasi ‘RUU Desa’, Yogyakarta, 10 - 11 Januari 2011.

tusi, sumber daya dan media<sup>8</sup>. Kolaborasi dari ke tiga unsur ini akan menentukan keberhasilan pada setiap tahap.

## 1. Tahap Pembangunan Visi Bersama

Adanya visi yang sama tentang SID di satu pihak akan menjadi penentu keberhasilan program, di pihak lain keberhasilan menggalang visi yang sama dapat dianggap sebagai wujud dukungan masyarakat yang akan mengawal keberadaan pemanfaatan SID. Sebagaimana pengertiannya, penerapan SID bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya komunitas. Tujuan ini yang harus pertama-tama dipahami dan terus-menerus ditinjau ulang secara bersama-sama.

Bila melihat struktur kelembagaan yang ada di tingkat desa, maka pemerintah desa adalah yang paling memiliki kewenangan formal untuk memimpin proses dalam pengelolaan sumber daya komunitas. Oleh karena itu, sebagai pemegang mandat formal untuk menjadi regulator dalam perencanaan desa maka tahap pembangunan visi bersama ini pertama-tama harus dipahami oleh mereka. Selain itu sebagai instrumen, keberadaan SID bertujuan untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran desa sekaligus mendorong pemerintahan desa menjadi kelembagaan yang kuat dan aktif.

Bagaimanapun program SID hanya dapat bermanfaat jika semua institusi yang ada di desa ikut mendapatkan akses untuk mengoperasikan ataupun memanfaatkan konten yang ada di dalamnya. Merujuk pada Zakaria<sup>9</sup>, bila melihat keberadaan berbagai institusi lokal di tingkat desa maka institusi di luar pemerintah

---

<sup>8</sup> Merujuk pada visi dan misi COMBINE Resource Institution (COMBINE singkatan dari Community Based Information Network) yang meyakini pemberdayaan komunitas ditopang oleh tiga pilar yaitu 1. Institusi/lembaga; 2. Sumber Daya; 3. Media dan Teknologi

<sup>9</sup> Zakaria, Yando, R. (2004), "*Merebut Negara: Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa*". LAPERA Pustaka Utama dan KARSA, Desember 2004

desa adalah modal sosial, baik sebagai mitra penyeimbang pelaksanaan proyek pembangunan atau sebagai pelaksana proyek itu sendiri. Pemanfaatan data yang ada di dalam SID berpeluang membuka dialog antar lintas aktor yang selama ini seringkali sulit tercapai. SID dengan kapasitasnya menyimpan, memanggil dan mengolah data dapat digunakan oleh masyarakat, regulator, pelaksana program di tingkat desa atau supra desa untuk mengkonsolidasikan data yang bersifat praktis maupun data yang dapat langsung atau tidak langsung dianalisis sebagai potensi, masalah maupun kebutuhan.

Pembangunan kesadaran adalah tahap yang perlu dilakukan berulang-ulang, agar terus-menerus mengalami penguatan. Pemerintah desa dapat menjadi pelopor dalam membuka ruang partisipasi bagi masyarakat luas. Sebagai sebuah sistem yang konvergen dengan jenis-jenis media lainnya (cetak, audio, video dan mobile sms), SID dapat mempromosikan opini dari pihak yang mendukung maupun keluhan ketidakpuasan dari masyarakat atas proses pembangunan maupun alokasi sumber daya yang berlangsung. Sehingga pada tingkat desa, sistem ini dapat menjadi refleksi bagi para perencana maupun pelaksana program pembangunan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi program di mata masyarakat.

## **2. Tahap Peningkatan Kapasitas**

Pemanfaatan SID sangat ditentukan oleh kegiatan peningkatan kapasitas yang menyeluruh, terencana dan terstruktur. Jenis kapasitas yang diberikan meliputi pengetahuan yang bersifat teknis maupun manajerial. Kedua aspek pengetahuan ini harus dipastikan tersedia agar kemanfaatan SID dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Isu peningkatan kapasitas ini akan dijabarkan lebih jauh pada bagian selanjutnya dari bab ini.

## **3. Tahap Kebijakan**

Konsep kewenangan desa sampai hari ini masih menjadi gagasan yang “kabur” pada tingkat perundang-undangan Nasional.

Dapat dikatakan bahwa disinilah sesungguhnya medan tempur antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan desa<sup>10</sup>. Dalam kondisi yang demikian, desa harus mengadvokasi dirinya untuk mendapatkan kewenangan tersebut. Adapun caranya dengan menggunakan SID sebagai media praktek untuk merencanakan, mengalokasikan dan mengontrol dana yang akan dan telah masuk ke desa. Dengan sistem perencanaan penganggaran yang terintegrasi, maka program-program pembangunan yang bersifat sektoral dan Bantuan Langsung Masyarakat, seperti PNPM Mandiri harus melakukan sinkronisasi dengan perencanaan yang disusun oleh desa tersebut.

Seperti halnya di dua tahap yang lain, sinergi pada unsur institusi, sumberdaya dan media sangat penting. Hal ini diwujudkan dalam keterlibatan secara partisipatif semua elemen pemerintah dan non pemerintah di skala desa, kolaborasi sumberdaya, baik yang materiil maupun non materiil, serta penggunaan berbagai format media untuk mensosialisasikan dan menjangkau aspirasi publik desa. Proses perencanaan dan interaksi dari ketiga unsur tersebut akan semakin optimal apabila dituangkan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sehingga dapat menjadi bagian dari desain kebijakan program SID. Pendokumentasian proses di tahap ini juga penting untuk dilakukan, agar desa setiap waktu dapat mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, dan mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada.

#### **4.2.2 Aspek pelembagaan di tingkat kabupaten**

Sejak tahun 2009 hingga 2011 ini, Sistem Informasi Desa telah diujicobakan di sejumlah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa tengah, Jawa timur, dan Jawa barat, yaitu:

Bantul, D.I. Yogyakarta	: Desa Terong, Desa Gilangjarjo, Desa Mulyodadi
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta	: Desa Nglegi, Desa Girikerto
Klaten, Jawa Tengah	: Desa Balerante, Desa Kendalsari,

---

<sup>10</sup> Seperti yang dapat dilihat pada Zakaria, Yando, R. (2004). op cit., bab IV

	Desa Panggang, Desa Tlogowatu, Desa Tegal Mulyo, Desa Sidorejo, Desa Talun, Desa Bawukan
Magelang, Jawa Tengah	: Desa Tejosari, Desa Pagergungung
Temanggung, Jawa Tengah	: Desa Kandangan
Pacitan, Jawa Timur	: Desa Punjung
Tasikmalaya, Jawa Barat	: Desa Mandalamekar

Penerapan di masing-masing desa tersebut tidak selalu dalam level intervensi yang sama, sehingga dalam proses dan kemajuannya sebagian berjalan lebih cepat dari perkiraan dan yang lain sangat lambat. Laju kemajuan tersebut ditentukan oleh faktor internal di desa maupun eksternal. Selain ketersediaan faktor *hardware*, *software* dan *orgware* sebagaimana yang telah digambarkan di bab sebelumnya, faktor motivasi dan kesadaran atas kebutuhan dari pengelola SID di wilayah mana penerapannya adalah contoh faktor internal yang menentukan. Sedangkan iklim kebijakan yang kondusif di tingkat supra desa dapat menjadi faktor yang merangsang desa untuk merevitalisasi sistem pendataannya melalui SID. Hal sebaliknya semestinya berlaku pula di tingkat kabupaten. Sayangnya, kemauan politik yang rendah dari pemerintah tingkat kabupaten seringkali merintangangi suatu pendekatan atau instrumen yang bermanfaat untuk diadopsi.

#### **4.2.2.1 Tantangan dari Pemkab Bantul dan Peluang dari Pemkab Gunung Kidul**

Tantangan dari Pemda Bantul berawal saat COMBINE mengundang keterlibatan mereka untuk mereplikasi SID. Adanya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diterapkan sejak pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008 merupakan momentum untuk mengintegrasikan program SID sebagai bagian dari kegiatan implementasi KIP pada lingkup birokrasi Pemda. Gayung tidak bersambut dengan alasan Pemda Bantul telah memiliki Perda tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Walaupun apabila melihat substansinya, Perda TPA Kabupaten Bantul tersebut lebih fokus pada ranah perencanaan dan penganggaran dae-

rah. Namun demikian, kesadaran bahwa program SID berpotensi memberi manfaat diakui oleh hampir semua SKPD, mengingat hampir seluruh SKPD memiliki program yang terkait dengan desa atau masyarakat desa. Beberapa orang di lingkungan Pemda yang memiliki kesadaran maju menyampaikan pendapatnya kepada kami bahwa jika program SID diterapkan, maka sesungguhnya pemerintah daerah sudah melakukan efisiensi dan efektifitas kerja maupun anggaran.

*“SKPD adalah bagian dari penerima manfaat apabila SID sudah digunakan oleh seluruh desa yang ada di Bantul, terutama BAPPEDA. SKPD sudah tidak perlu lagi repot-repot turun ke desa atau kecamatan untuk mencari data, cukup menelpon Pemerintah Desa atau membuka websitenya, maka data yang ada sudah bisa diakses”*  
(Staff PMD Kabupaten Bantul)

Kesadaran tentang pentingnya SID biasanya muncul dari staff Pemda yang pernah bersinggungan langsung dengan program ini. Mereka beranggapan bahwa seharusnya Pemda mengadopsi sistem ini untuk diterapkan di seluruh desa yang ada di Bantul, akan tetapi mereka juga menyadari masih lemahnya komitmen dari para pembuat kebijakan.

*“Saya sebenarnya sangat mendukung SID ini dipakai di semua desa di Bantul, dan didorong menjadi kebijakan pemerintah daerah, namun sepertinya arah kesana masih cukup berat perjuangannya, mengingat kesadaran pemerintah kabupaten akan pentingnya data dan informasi belum cukup penting, sehingga sepertinya belum menjadi prioritas”*  
(Staff Pemda Bantul)

Berbeda dengan komitmen Pemda Bantul, Pemda Gunungkidul nampak lebih terbuka dengan keberadaan SID, dan memiliki keinginan untuk memperkuat 2 desa, yakni: Nglegi dan Girikarto yang memang sudah menginisiasi keberadaan SID sebagai *pilot project* di tingkat kabupaten. Kedua desa ini rencananya akan didukung dengan infrastruktur yang memadai dalam rangka mengembangkan SID, akan tetapi komitmen tersebut memang

belum cukup konkret dan baru berbentuk komitmen lisan, belum terlihat jelas dari sisi kebijakan atau anggaran. Selain itu, saat ini Pemda Gunungkidul juga sedang menginisiasi pembentukan Perda Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam Perda tersebut rencananya akan dimasukkan SID sebagai bagian dari komitmen Pemda terhadap transparansi dan aksesibilitas informasi publik serta bentuk perhatian terhadap desa.

#### **4.2.2.3 Peraturan Daerah sebagai Jawaban**

Berangkat dari pengalaman COMBINE tersebut, sangat nyata bahwa meskipun intervensi Pemda sebagai dasar kebijakan dalam penerapan program SID sangat penting, namun tidak mudah untuk merealisasikannya. Program SID yang mempromosikan kapasitas desa dalam menyusun perencanaan, alokasi dana dan kontrol lokal, secara politis dapat diterjemahkan sebagai wujud penerapan kewenangan pada skala desa. Padahal bagi sebagian besar Kabupaten menyerahkan kewenangan kepada desa masih problematik. Umumnya karena mereka mengalami kesulitan mencari formula yang tepat, atau memang tidak tahu, atau memang karena enggan sebab pembagian kewenangan juga harus diikuti dengan uang<sup>11</sup>. Padahal akibat ketiadaan wewenang itu pula substansi perencanaan yang disusun dalam RPJMDes-sebagai syarat menerima ADD-seringkali mengalami kesulitan, salah satunya karena muara kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota. Melalui SID maka kabupaten dapat “memaksa” desa untuk menggunakan ADD agar tepat sasaran, yaitu operasional 30% dan 70% pemberdayaan masyarakat. SID juga dapat menjadi instrumen Pemkab untuk melakukan pembinaan dan supervisi thd perencanaan dan penggunaan ADD.

“Kerelaan” pemerintah Kabupaten untuk meletakkan desa sebagai aktor utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan sesungguhnya bukan tanpa alasan. Konten yang termuat dalam SID dapat mendukung Pemkab pada beberapa hal berikut ini:

- Menyediakan data dan informasi tentang potensi desa

---

<sup>11</sup> Eko, Sutoro (2011), *op cit.*, hal 19

yang perlu dikembangkan dan kerentanan yang membutuhkan afirmasi.

- Data dan informasi yang ada dapat memberi peluang terbukanya ruang mobilitas sosial ekonomi warga dan masyarakat desa, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
- Proses partisipatif yang digunakan oleh program SID dapat menghasilkan rekomendasi dan usulan dengan cakupan isu lebih besar dan strategis.

Melihat kebutuhan yang ada, maka intervensi kebijakan dalam bentuk Perda menjadi suatu keniscayaan. Perda merupakan bentuk pelembagaan yang paling ideal atas sebuah inovasi yang akan diwujudkan lebih konkret dengan komitmen dari sisi program dan anggaran agar memungkinkan bagi desa-desa lainnya untuk mereplikasi program ini dengan dukungan dari pemerintah daerah. Secara substantif Perda tersebut akan dapat menjawab kebutuhan legitimasi terhadap penerapan SID di tingkat desa dan pelembagaan di tingkat kabupaten sebagai wadah pertukaran pengetahuan dalam hal pemanfaatan. Perda tersebut juga diharapkan dapat menjabarkan tanggung jawab pihak desa, kecamatan dan kabupaten dalam memastikan ketersediaan unsur: 1) **institusi** yaitu jaringan lembaga pendukung yang dapat mengotimalkan program SID; 2) **Sumber daya** dalam hal ini program-program pembangunan yang datanya harus terintegrasi dalam program SID dan forum tatap muka langsung atau sistem yang bisa menjadi *interface* lintas pihak untuk mensinkronisasi dan mengkonsolidasikan data dan informasi yang ada; dan 3) **media** yang dikembangkan untuk memperluas pemanfaatan SID di semua tingkatan. Pada akhirnya sebuah kebijakan-sebagai pintu bagi perubahan- tidak akan berfungsi secara maksimal, jika tidak diikuti dgn instrumen atau kelengkapan-kelengkapan yang perlu ada. Begitu pula sebaliknya, pada setiap instrumen diperlukan sebuah kebijakan yg dapat memperkuat manfaat yg ditawarkan oleh instrumen tersebut.

### 4.3. Peningkatan Kapasitas

Pada bagian awal bab ini telah dijabarkan aspek-aspek yang menentukan kinerja penerapan SID, yaitu ketersediaan *hardware*, *software* dan *orgware*. Untuk memastikan ke tiga aspek tersebut dapat terpenuhi sepanjang penerapan SID, maka dibutuhkan intervensi dalam bentuk peningkatan kapasitas yang komprehensif. Oleh karena itu, desain peningkatan kapasitas dalam program SID adalah salah satu bagian yang perlu dipersiapkan sejak awal. Ada 3 (tiga) tingkat yang harus menjadi sasaran cakupan peningkatan kapasitas agar program menjadi efektif dan berkelanjutan (*sustainable*), masing-masing adalah:

1. Tingkat **Individu**, mencakup kualifikasi dan ketrampilan yang teknis maupun non teknis, pengetahuan, sikap maupun motivasi individu-individu yang diidentifikasi akan menjadi pelaku kunci dalam penerapan SID.

Sebagai Teknologi Informasi, SID mengandalkan perangkat keras (*hardware*) dan lunak (*software*) yang bagi kebanyakan orang masih membutuhkan keterampilan khusus. Meskipun saat ini teknologi komputer telah masuk ke desa-desa di Indonesia, namun tetap bukan teknologi yang digunakan sehari-hari. Berdasarkan pengalaman penerapan SID selama ini, bahkan di tingkat pemerintah desa keterampilan dalam menggunakan komputer dan komponen pendukungnya tidak berlaku secara merata.

Ada beberapa prinsip yang harus dijadikan acuan untuk mentransfer pengetahuan teknis, sebagai berikut:

1. Jika dilakukan di tingkat desa sebagai wilayah penerima manfaat langsung, maka harus melibatkan multi pihak dari kelompok pemerintah maupun non pemerintah
2. Identifikasi kapasitas teknis yang telah dimiliki oleh mereka yang akan dilibatkan
3. Ketersediaan modul yang mudah dipahami oleh siapapun yang memiliki tingkat keterampilan teknis terbatas, termasuk semua komponen perangkat yang dibutuhkan.

4. Kesesuaian antara peta kapasitas dari individu yang ada dengan kebutuhan kapasitas yang harus dilengkapi.

Di luar aspek teknis, SID membutuhkan individu-individu yang berperan sebagai pelopor dalam kegiatan penerapannya. Mereka adalah orang-orang kunci yang harus menguasai visi dan misi program, yang mewakili pemerintahan desa maupun pihak non regulator yang berperan aktif di tengah masyarakat desa. Mereka akan dilatih untuk memfasilitasi pemanfaatan SID di tingkat desa hingga membangun kelembagaan dan kebijakan pada program SID. Selain sebagai fasilitator yang mengawal kegiatan pertukaran pengetahuan tentang program SID dengan pihak-pihak lain, mereka juga akan berperan sebagai juru bicara yang mendemonstrasikan pemanfaatan SID ke tingkat pemerintah supra desa, maupun ke organisasi lain dalam kepentingan hubungan dan jaringan yang perlu dibangun untuk mengoptimalkan pemanfaatan SID. Kelompok individu ini juga akan memperoleh keterampilan untuk melakukan “pengukuran” terhadap efektifitas dan efisiensi dari program, monitoring dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai.

2. Tingkat **Organisasi**, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah akan mendapatkan peningkatan kapasitas agar dapat mengadaptasi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, alat-alat manajemen, hubungan dan jaringan antar organisasi.

SID dapat terpelihara dengan baik dan terus berkelanjutan bila didukung oleh jaringan organisasi yang ikut mengambil manfaat dari program tersebut. Pada dasarnya penerapan SID dapat diinisiasi oleh pihak eksternal maupun internal desa. Siapapun yang menjadi inisiator dalam implementasi program tetap harus membangun kemitraan dengan pihak lain, yang memiliki irisan kepentingan sama maupun pihak yang dapat dimintakan kontribusi keterlibatan secara sukarela. Peluang kemitraan antar organisasi tersebut harus diidentifikasi sejak awal oleh inisiator program dan diorganisir agar memperoleh peningkatan kapasitas. Mereka mungkin adalah LSM atau organisasi massa yang

melakukan aktivitas pemberdayaan di wilayah desa dimana SID diterapkan atau lembaga pendidikan yang memiliki siswa yang berminat atau terampil pada bidang TIK. LSM IDEA yang memiliki program advokasi anggaran di desa-desa di Gunung Kidul, misalnya adalah mitra sekaligus inisiator untuk menerapkan program SID di wilayah itu. COMBINE sendiri berperan menjadi narasumber untuk wilayah teknologi informasi dan pengembangan media untuk pemanfaatan SID.

Berdasarkan pengalaman COMBINE, ada 5 (lima) langkah yang penting untuk dilakukan dalam proses peningkatan kapasitas terhadap organisasi, masing-masing adalah:

1. *Aasesmen*: menggali isu yang menjadi kepentingan setiap organisasi dan pada bagian mana SID dapat mendukung kepentingan tersebut; struktur dan model pendekatan yang digunakan organisasi terhadap masyarakat.
2. *Kesepakatan (agreement)*: dalam hal ini menyepakati pembagian peran, sumber pendanaan, struktur tanggung jawab yang harus diisi, dan mekanisme koordinasi, monitoring dan evaluasi program.
3. *Implementasi*: mengembangkan desain dan rencana implementasi program
4. *Evaluasi*: untuk menemukenali hal-hal yang telah sesuai dan tercapai, atau sebaliknya
5. *Penyesuaian*: memodifikasi pendekatan dan strategi implementasi

Seluruh langkah diatas dapat dibagi dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang, sehingga pada setiap jangka waktu tersebut dikaji ulang capaiannya.

3. Level **Sistem**, merujuk pada kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dan peraturan yang di tingkat lembaga. Reformasi kebijakan di tingkat Pemda dibutuhkan untuk melegitimasi SID. Peningkatan kapasitas pada tingkat ini juga mencakup sasaran untuk memodifikasi prosedur kerja dan mekanisme koordinasi, memperbaiki ketrampilan ada perspektif dari personil yang ada di dalam sistem pemerintah yang disasar. Pemahaman yang

pertama-tama harus diletakkan adalah tentang kewenangan yang harus diberikan ke desa untuk menyusun perencanaan dan bagaimana SID sebagai instrumen yang dapat mendukung pada area tersebut.

Tahap pembangunan visi tentang SID di lingkungan instansi pemerintahan dapat dilakukan dalam sebuah *workshop* awal dan serangkaian pelatihan. Pada tahap awal peningkatan kapasitas itu pula perlu diidentifikasi berbagai kebijakan, regulasi dan prosedur yang mendukung maupun merintangai sasaran kebijakan hingga prosedur yang digunakan oleh SID. Sinkronisasi terhadap kesenjangan yang ada menjadi krusial sehingga semua pihak dapat menemukan titik sepakat untuk melangkah ke peningkatan kapasitas selanjutnya.

Ada beberapa prinsip yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan peningkatan kapasitas di level sistem, yaitu<sup>12</sup> :

1. Bersifat multi-dimensi, karena cakupan perubahan yang diharapkan sangat beragam maka didesain untuk diberikan dalam jangka waktu yang periodik (jangka pendek, menengah dan jangka panjang)
2. Melibatkan berbagai lapis dan bagian dari lingkungan instansi pemerintah daerah tingkat kabupaten, termasuk jajaran Bappeda dan SKPD.
3. Harus berangkat dari permintaan dan kebutuhan Pemerintah daerah, dengan demikian Pemda yang akan menyiapkan pendanaan untuk memperoleh layanan peningkatan kapasitas ini. Untuk menemukenali kebutuhan tersebut, lembaga-lembaga yang menginisiasi program dapat memfasilitasi proses, salah satunya dengan memetakan kebutuhan di tingkat desa dan mensinkronkan dengan realitas kebijakan yang ada saat ini, misal-

---

<sup>12</sup> Merujuk beberapa prinsip yang digunakan oleh GTZ (2005), dalam "*Guidelines on Capacity Building in the Regions. Module C: Supplementary Information and References*". The Support for Decentralization Measures (SfDM) P4D Report, disiapkan oleh Rainer Rohdewohld (GTZ-SfDM) and Dr. Manfred Poppe (Plandialog)., Version 2.0 Februari, 2005

nya adanya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk menciptakan *good governance* yang mendorong Pemda untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

# SEBUAH CATATAN PENEGASAN

Reformasi (pembaruan) desa secara konseptual mengandung komponen pemerintahan (*village governance*), pembangunan (*rural development*) dan pemberdayaan (*community empowerment*) dengan tujuan untuk mencapai desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera<sup>1</sup>. Sebagai sebuah sistem yang bertujuan mengelola sumber daya yang ada di komunitas, SID hadir dalam semangat untuk mendukung pemerintahan desa yang mandiri, mendorong terwujudkannya pembangunan pedesaan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Melalui SID sebagai instrumen teknologi informasi, COMBINE ingin menantang kegamangan dan ambiguitas pembuat kebijakan di tingkat pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan dan mengembangkannya hak bawaan desa yang sudah ada dan dimiliki desa sebelum ada Republik Indonesia. Begitu pula birokrasi yang lambat dan tidak efisien, pada akhirnya harus ditinggal ketika ada cara yang lebih mudah untuk mengerahkan sumber daya, membagi informasi dan mengkoordinasikan aktivitas dalam skala yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang lebih singkat. SID menawarkan perubahan tersebut, setidaknya pada awal penerapannya, kapasitas SID dalam membantu pemerintah desa untuk memperbaiki kualitas layanan publik mendapat pengakuan.

Mengorganisasi kerja manusia menjadi lebih efektif dan efisien adalah kapasitas simultan dari teknologi informasi, namun kiranya itu hanya sebuah fakta awalan. Bagi COMBINE program

---

<sup>1</sup> Seperti yang dapat dilihat pada Eko, Sutoro (2011). op cit., hlm 6

SID tidak di desain untuk berhenti pada tujuan yang kerap dirancang oleh program *e-government*. Meskipun pada tingkat itu, SID telah dianggap banyak pihak sebagai inovasi yang menjanjikan. Kalau sanjungan yang nyaris sama dengan yang diberikan terhadap beberapa inovasi TIK untuk pemerintahan di sejumlah wilayah pemerintahan daerah cukup sebagai buktinya. Bila tidak hati-hati, maka SID akan terjebak menjadi produk yang hanya direplikasi pada aspek *hardware of technology*nya semata dan kemudian ambruk setelah sejumlah investasi materiil dikeluarkan. Oleh karena itu, mengupayakan agar program SID diterapkan secara lebih luas dengan prosedur dan desain yang utuh adalah undangan terbuka terhadap pihak pemerintah dan non pemerintah yang memiliki kesepahaman dan cita-cita yang sama dengan COMBINE. Prasyaratnya dan mekanismenya telah dituangkan dalam buku ini, yang masih perlu dipertegas adalah resiko perangkapnya. SID adalah teknologi yang membutuhkan ketrampilan dan pengelolaan teknis, tapi bukan untuk memecahkan solusi yang teknis. Sehingga permasalahan maupun tantangan teknis tidak boleh menyita perhatian yang utama.

Penggalian manfaat SID adalah jalan panjang yang harus di letakkan di depan, dengan penerima manfaat utamanya adalah desa, dalam arti semua institusi yang ada di dalamnya, baik yang *indigenous institution*, *corporatist institutions* dan *civil institution*. Pemerintah supra desa tentu saja bisa menjadi penerima manfaat selanjutnya, asalkan sepakat bahwa data dan informasi di dalam SID tersedia untuk menjadi basis kedaulatan rakyat desa. Adakah alasan untuk khawatir ketika kedaulatan berada di tangan rakyat? ketika desa dapat mempunyai tata pemerintahan yang baik, perencanaan yang berkualitas, mempunyai masyarakat yang aktif dan partisipatif sehingga akhirnya dapat mengembangkan potensi ekonomi lokalnya? Dan pada akhirnya, SID ingin mempertegas posisinya sebagai bagian dari gerakan yang akan selalu mengkoreksi kebijakan yang bersifat *top-down* dan mengembalikan hak desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri, sehingga desa bukan lagi dimaknai sebagai unit pemerintahan terkecil yang harus tunduk pada pusat, namun desa menjadi pemerintahan otonom, dalam makna sosial, politik, ekonomi dan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin, dkk *"Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal"*; cetakan 1, April 2011, Penerbit: STIM YKPN Yogyakarta

Pengertian Teknologi Tepat Guna: [http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi\\_tepat\\_guna](http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_tepat_guna)

Data wawancara terhadap fasilitator IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*), Jogjakarta, 2010

Eko, Sutoro & Krisdyatmiko, 2006. (ed). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. IRE, Jogjakarta (cetakan 1).

Eko, Sutoro (2011), *"Membuat Desa Sebagai "Negara Kecil" yang Demokratis, Mandiri dan Sejahtera"*. Working Paper Seri 2, Juli 2011. Paper ini diunduh dari <http://www.ireyogya.org/id/article/working-paper/membuat-desa-sebagai-negara-kecil-yang-demokratis-mandiri-dan-sejahtera.html;download=d77e68596c15c53c2a33ad143739902d#downloadFile>, pada tanggal 7 Februari

Eko, Sutoro, *"Otonomi Desa: Kebijakan, Pengalaman dan Perspektif"*. diunduh dari [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org),

GTZ. *"Evaluasi terhadap Program Desa Mandiri Energi: dari aspek transferteknologi, Kelembagaan, dan Partisipasi Masyarakat"*. Publikasi oleh Dukungan Strategis dan yTerhadap Program Desa Mandiri Energi, bekerja sama dengan GTZ GmbH, Mei, 2009

GTZ (2005), dalam "*Guidelines on Capacity Building in the Regions. Module C: Supplementary Information and References*". The Support for Decentralization Measures (SfDM) P4D Report, disiapkan oleh Rainer Rohdewohld (GTZ-SfDM) and Dr. Manfred Poppe (Plandialog)., Version 2.0 Februari, 2005

Laporan Program *Aceh Reconstruction Radio Network (ARRNet) 2006-2007*, disusun oleh COMBINE Resource Institution sebagai pertanggungjawaban program yang dibiayai oleh *Japan Social Development Fund*, disampaikan kepada *Multi Donor Fund, World Bank*.

Nurcholis, Hanif., dkk (2008), "Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah". Gramedia: 2009

Purnamasari, Irma., "Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi". Tesis Program PascaSarjana Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro. Atau "Dilema Perencanaan Pembangunan Desa" di:<http://www.desaciburial.com/dilema-perencanaan-pembangunan-desa/>

Thorne, Steve (2007). *Towards a framework of clean energy technology receptivity*. Volume 36, Issue 8, August 2008, Pages 2831–2838. Artikel yang diunduh dari: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142150800116X>, diunduh pada Februari 6, 2012

Thorne, Steve (2007) *Community Based Technology Solutions: Adapting to Climate Change*. Booklet yang dipublikasikan oleh South South North (SSN). Diunduh dari: <http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=9545>, tanggal 7 Februari, 2012

Tim IRE Yogyakarta, terdiri dari: AAGN Ari Dwipayana (Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM), Andi Sandi (Hukum Tata Negara, FH UGM), Arie Sujito (Sosiologi Fisipol UGM), Bambang Hidayana (Antropologi FIB UGM), Krisdyatmiko (Sosiatri Fisipol UGM) dan Sutoro Eko (Ilmu Pemerintahan, STPMD "APMD" Yogyakarta). *"Review Pembangunan Pedesaan"* Diunduh dari [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org).

Zakaria, Yando. R., (2011) dalam *"Menggagas Arah Kebijakan/Regulasi tentang DESA yang 'Menyembuhkan Indonesia'"*. Materi presentasi yang disampaikan pada Simposium Konsolidasi Jaringan Advokasi 'RUU Desa', Yogyakarta, 10 - 11 Januari 2011.

Zakaria, Yando, R. (2004), *"Merebut Negara: Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa"*. LAPERA Pustaka Utama dan KARSA, Desember 2004

## TENTANG PENULIS

### **Ranggoaini Jahja**

Ranggoaini Jahja atau Nieke, lahir di Jakarta, 18 Juli 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 nya di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1998 dan memperoleh gelar Master untuk Ilmu Antropologi dan Budaya pada tahun 2003 dari Fakultas Antropologi Universitas Gadjah Mada. Memulai aktivitas pemberdayaan masyarakat sejak tahun 1996 hingga 2004 pada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat di Jakarta yang memiliki perhatian terbesar pada permasalahan Anak dan Perempuan, sebelumnya akhirnya bergabung dengan COMBINE Resource Institution. Saat ini ia menjadi Direktur Pelaksana di lembaga tersebut.

### **Haryana**

Alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1997) ini bergabung di COMBINE Resource Institution Yogyakarta sejak tahun 2010. Saat ini menjadi bagian dari Unit Strategis di lembaga yang sama. Sejak tahun 1999 aktif sebagai peneliti lepas di PSPK UGM, Lappera Indonesia, Forum LSM Yogyakarta, Bina Swadaya, Demos, International Relief & Development serta USAID- DAI.

### **Dina Mariana**

Aktif sebagai penelliti di IRE Yogyakarta. Semenjak Lulus dari Fakultas Hukum UGM, aktif di ICW Jakarta. Saat ini sedang menempuh Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

### **Meldi Rendra**

Alumnus Teknik Geologi ITB Bandung, Saat ini sedang menempuh Magister Sistem Teknik Di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sejak 2011 bergabung di COMBINE Resource Institution Yogyakarta sebagai staf Unit Strategis.

